PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN



PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KABUPATEN PACITAN

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PACITAN
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025-2029

KECAMATAN PACITAN

TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pacitan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kecamatan Pacitan, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Kecamatan Pacitan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Kecamatan Pacitan Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Kecamatan Pacitan. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami, dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi atas kinerja pelayanan, serta mendorong tercapainya pelayanan publik yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pacitan.

Pacitan, 19 September 2025
Camat Pacitan
Kabupaten Pacitan

SUGIYEM, AP, M.Si
NIP 19740808 199311 2 001
Pangkat Pembina Tingkat I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **III**

DAFTAR ISI ..... **V**

DAFTAR TABEL ..... **VII**

DAFTAR GAMBAR ..... **VIII**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 9

2 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **13**
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 13
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 13
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan 16
2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi 16
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Pacitan 24
2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan 25
2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Pacitan 27
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 31
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah 60
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan 62
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah 64
2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah 65
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 66
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 66
2.2.2 Isu Strategis 69
2.2.2.1 Isu Global 69
2.2.2.1.1 Pengelolaan Sampah Padat Perkotaan 70
2.2.2.1.2 Kelangkaan Air dan Bencana Kekeringan 72
2.2.2.2 Telaah Isu Nasional 75
2.2.2.2.1 Luas Permukiman di Area Pesisir Terdampak Perubahan Iklim 75
2.2.2.2.2 Kawasan Rawan Bencana 76
2.2.2.2.3 Ketersediaan Air 77
2.2.2.2.4 Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat 78
2.2.2.2.5 Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan 79

2.2.2.3 Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029 .. 80
2.2.2.3.1 Pemerataan Akses dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 81
2.2.2.3.2 Optimalisasi Partisipasi Sekolah dan Pemenuhan Fasilitas Pendidikan 82
2.2.2.3.3 Kemiskinan dan Pemenuhan Hak Dasar Penduduk Miskin 84
2.2.2.3.4 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 86
2.2.2.3.5 Peningkatan Infrastruktur Daerah 88
2.2.2.3.6 Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Ketersediaan Air 89
2.2.2.4 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan 91
2.2.2.4.1 Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas, Unggul, dan Berbudaya 92
2.2.2.4.2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata dan Sektor Unggulan Daerah 93
2.2.2.4.3 Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat 96
2.2.2.4.4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan 99
2.2.2.5 Potensi Daerah 101
2.2.2.6 Isu Strategis Kecamatan Pacitan 2025-2029 102

3 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..111
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 111
3.2 Strategi Kecamatan Pacitan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 116
3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Pacitan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 118

4 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....126
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah..... 126
4.2 Subkegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 148
4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 149
4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 150

BAB V PENUTUP.....152
5.1 Kesimpulan 152
5.2 Kaidah Pelaksanaan..... 153
5.3 Pengendalian dan Evaluasi 154

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Pacitan Berdasarakan Pangkat 25
Tabel 2.2 Jumlah Sarana Prasarana Kecamatan Pacitan 27
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pacitan Tahun 2020-2024 32
Tabel 2.4 Pagu dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pacitan Tahun 2020-2024 67
Tabel 2.5 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Pacitan 61
Tabel 2.6 Mitra Kecamatan Pacitan 62
Tabel 2.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Kecamatan Pacitan 65
Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pacitan 67
Tabel 2.9 Hierarki Pengelolaan Sampah serta Aktornya dalam Mengendalikan dan Mengelola Produksi Sampah Padat Perkotaan 71
Tabel 2.10 Perumusan Isu Kecamatan Pacitan 103
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pacitan 114
Tabel 3.2 Penentuan Strategi Kecamatan Pacitan 117
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Pacitan 119
Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pacitan 122
Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 127
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2026-2030 137
Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 149
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pacitan 150
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pacitan 150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pacitan 24
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kelurahan di Bawah Kecamatan Pacitan 24
Gambar 2.3 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kecamatan Pacitan 2020-2024 63
Gambar 2.4 Persentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun Bidang: Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, dan Kesejahteraan Sosial 64
Gambar 2.5 Persentase Desa yang Sudah Menyusun Administrasi Sesuai dengan Ketentuan Dokumen: Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan 65
Gambar 3.1 Logical Framework Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 115
Gambar 3.2 Pohon Kinerja Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. 116

BAB I
PENDAHULUAN



PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Pacitan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pacitan yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Pacitan berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra ini kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra ini juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Pacitan. Selain itu, Renstra berperan penting dalam menuntun Kecamatan Pacitan sebagai Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan Pemerintah Kabupaten Pacitan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki.

Terdapat beberapa proses yang harus ditempuh dalam penyusunan Renstra ini, antara lain persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Pada aspek substansi, dokumen Renstra Kecamatan Pacitan memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain:

- RPJMD Kabupaten Pacitan 2025-2029 sebagai acuan tujuan, sasaran, dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Pacitan;
- Renstra kementerian/lembaga sebagai acuan pelaksanaan program pembangunan dari tingkat nasional;
- Renstra Provinsi Jawa Timur sebagai acuan pelaksanaan program pembangunan dari tingkat provinsi; dan
- Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pacitan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup.

Adapun penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pacitan sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih Tahun 2025–2029 dan RPJMD. Maka, untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih yaitu *"**Pacitan Semakin SEJAHTERA BAHAGIA**"*, Kecamatan Pacitan menitikberatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada misi yang keempat yaitu *"Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani"*.

Renstra Kecamatan Pacitan pada hakikatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk konkret

dari apresiasi Kecamatan Pacitan terhadap apa yang harus dilakukan agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada upaya menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi Kepala Daerah Kepala Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Pacitan.

Renstra Kecamatan Pacitan memiliki peran sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 2026-2030. Selain itu, Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Kecamatan Pacitan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembar Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029:
26. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pacitan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Kecamatan Pacitan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pacitan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pacitan;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Pacitan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pacitan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Pacitan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Pacitan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Pacitan untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pacitan yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pacitan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang

merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:

1.1 Latar Belakang;

1.2 Dasar Hukum;

1.3 Maksud dan Tujuan; dan

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Kecamatan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategis

BAB III: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan dalam lima tahun mendatang. Perinciannya sebagai berikut:

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029

3.2 Strategi Kecamatan Pacitan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Pacitan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta rincian subkegiatan perangkat daerah yang mendukung program prioritas kepala daerah. Selain itu, pada Bab ini disajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci. Kinerja ini akan diwujudkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pacitan. Berikut untuk perinciannya:

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah

4.2 Subkegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan

Daerah

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, perinciannya antara lain:

5.1 Kesimpulan

5.2 Kaidah Pelaksanaan

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab ini akan menjelaskan tentang gambaran pelayanan perangkat daerah. Gambaran tersebut meliputi tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan, kelompok sasaran pelayanan, mitra perangkat daerah, dukungan BUMD, serta kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Subbab ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi perangkat daerah beserta kemampuannya dalam melaksanakan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan, maka Kecamatan Pacitan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan dan/atau Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Pacitan yang dipimpin oleh Camat meyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
    1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan;
    2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah Kecamatan;

3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keterliban umum, meliputi;
   1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
   3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
   1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
   2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan

3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
   1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   2. efektivitas penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
   3. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;

h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;

i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan Pacitan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat;
b. Seksi Pelayanan Umum;
c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
e. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban; dan Kelurahan.

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok juga mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan;
e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan Kecamatan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi

Susunan Organisasi Kecamatan Pacitan memiliki 4 (empat) Seksi, di antaranya Seksi Pelayanan Umum, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban. Selain itu, dalam susunan organisasi Kecamatan Pacitan juga terdapat Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun tugas pokok dan fungsi susunan organisasi tersebut adalah:

1. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang kemudian dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pelayanan umum. Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan tugas:

a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
b. mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan;
c. menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/ kelurahan;
d. menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, dan pelayanan umum lain;
e. memfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
f. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya, serta meregistrasi urusan yang dilimpahakan kepada Camat yang bukan menjadi kewenangannya;
i. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, dan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemerintahan. Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan tugas:

a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
b. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
c. melaksanakan fasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
e. memfasilitasi pengurusan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan;
f. melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
g. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
h. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
i. memfasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan dan kerja sarna antarkecamatan;
j. memfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;

k. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
l. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
m. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
n. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
o. memfasilitasi pelaksanaarl pemilihan kepala desa;
p. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
q. menyusun rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
r. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
s. melaksanakan urusan yang dilimpahakan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
t. melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan tugas:

a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
c. memfasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
d. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
e. mengoordinir pendampingan desa di wilayahnya;
f. mengoordinir pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
g. mengoordinir kegiatan pemberdayaan desa;
h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
i. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
j. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
l. melaksankan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
m. meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
n. melaksanakan kegiatan pemberdayaan desa dan/atau Kelurahan;
o. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau Kelurahan;
p. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa dan/atau Kelurahan;

q. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di desa dan/atau Kelurahan;
r. melaksanakan evaluasi desa dan/atau Kelurahan;
s. melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
t. menyelenggarakan lembaga kemasyarakatan;
u. meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
v. memfasilitasi sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
w. memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
x. memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam;
y. melaksanakan urusan yang dilimpahakan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
z. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan tugas:

a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;
b. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;

c. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
e. menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
f. memfasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
g. menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
h. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
i. memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam;
j. menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;
k. melaksanakan urusan yang dilimpahalan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
l. melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman keterliban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
m. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

5. Kelurahan

Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan dipimpin oleh Lurah. Kelurahan pada kecamatan Pacitan tediri dari: (a) Kelurahan Baleharjo; (b) Kelurahan Sidoharjo; (c) Kelurahan Ploso; (d) Kelurahan

Pucangsewu; dan (e) Kelurahan Pacitan. Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam:

a. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan;
b. melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
c. melakukan kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana: lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan serta pendidikan dan kebudayaan;
d. melaksanakan pelayanan masyarakat;
e. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
f. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikal oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Pacitan sebagimana Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pacitan



Sumber: Peraturan Bupati Pacitan No. 156 Tahun 2021

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kelurahan di Bawah Kecamatan Pacitan



Sumber: Peraturan Bupati Pacitan No. 156 Tahun 2021

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Pacitan

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasio maupun sarana dan prasarana. Kemudian seiring dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta

ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan pula sumber daya manusia yang kompeten dengan jumlah yang cukup dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan

Aktivitas pemerintahan Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi terdiri dari Camat, Sekretariat, Seksi Pelayanan Umum, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban; dan Kelurahan. Adapun sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Pacitan sebanyak 72 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Pacitan Berdasarakan Pangkat

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda	IV/c	-
2	Pembina Tk. I	IV/b	1
3	Pembina	IV/a	1
4	Penata Tk I	III/d	12
5	Penata	III/c	3
6	Penata Muda Tk I	III/b	7
7	Penata Muda	III/a	5
8	Pengatur Tk I	II/d	6
9	Pengatur	II/c	-
10	Pengatur Muda	II/a	2
11	CPNS	-	1
12	PPPK	-	3
13	Lain lain	-	31
JUMLAH			**72**

Sumber: Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, 2025

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kecamatan sebanyak 72 orang. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan berada

dalam kondisi **belum ideal**. Ini ditunjukkan dengan 31 orang dari total 72 pegawai yang merupakan tenaga teknis non-ASN (lain-lain). Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

1. Magister S-2 : 5 Orang
2. Sarjana S-1 : 38 Orang
3. Diploma -3 : 4 Orang
4. SLTA : 25 Orang
5. SLTP : -
6. SD : -

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang S1, yang mencerminkan **kesiapan** dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dapat diperinci berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

1. Usia < 30 tahun : 17 Orang

2. Usia 30–39 tahun : 10 Orang
3. Usia 40–49 tahun : 12 Orang
4. Usia ≥ 50 tahun : 33 Orang

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok usia **di atas 50 tahun** mendominasi komposisi pegawai saat ini. Hal ini mengindikasikan kebutuhan regenerasi pegawai, menuntut perhatian dalam perencanaan pensiun dan penggantiannya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis SDM yang mempertimbangkan aspek demografi agar kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Pacitan

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Pacitan sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat diperinci sebagai berikut.

Tabel 2.2 Jumlah Sarana Prasarana Kecamatan Pacitan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1		1
2	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1		1
3	Tanah Bangunan Pasar	1		1
4	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	4		4
5	Tanah Bangunan Gudang	1		1
6	Tanah Bangunan Industri Rokok	1		1
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6		6
8	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	3		3
9	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	1		1
10	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	1		1
11	Tanah Untuk Bangunan Masjid	11		11
12	Tanah Rawa	7		7
13	Tanah Sawah Irigasi	139		139
14	Tanah Kebun Induk	1		1
15	Tanah Kebun Percobaan	1		1
16	Tanah Lapangan Sepak Bola	2		2

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
17	Tanah Untuk Makam Muslim	2		2
18	Tanah Untuk Makam Umum	2		2
19	Portable Generating Set	6		6
20	Station Wagon	6		6
21	Sepeda Motor	62		62
22	Gerobak Tarik	1		1
23	Gerobak Dorong	1		1
24	Caravan	1		1
25	Gergaji Chain Saw		1	1
26	Mesin Fotocopy Folio	1		1
27	Lemari Besi/Metal	4		4
28	Lemari Kayu	14		14
29	Rak Besi	1		1
30	Rak Kayu	4	3	7
31	Filing Cabinet Besi	10		10
32	Brandkas	5		5
33	Lemari Kaca	12		12
34	Etalase	8		8
35	CCTV - Camera Control Television System	2		2
36	Papan Visual/Papan Nama	9		9
37	White Board	3		3
38	Alat Penghancur Kertas	1		1
39	Mesin Absensi	6		6
40	LCD Projector/Infocus	8		8
41	Papan Nama Instansi	2		2
42	Meja Kerja Kayu	15		15
43	Kursi Besi/Metal	2		2
44	Kursi Kayu	4		4
45	Meja Rapat	30		30
46	Tempat Tidur Besi	1		1
47	Meja Podium	1		1
48	Meja Resepsionis	2		2
49	Meja Makan Kayu	1		1
50	Kursi Rapat	4		4
51	Kursi Tamu	11		11
52	Kursi Putar	8		8
53	Bangku Tunggu	6		6
54	Kursi Lipat	1		1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
55	Meja Komputer	2		2
56	Partisi	1		1
57	Sofa	1		1
58	Mesin Pemotong Rumput	1		1
59	Lemari Es	4		4
60	AC Split	16	4	20
61	Kipas Angin	21	1	22
62	Rice Cooker (Alat Dapur)	1		1
63	Rak Piring Alumunium	4		4
64	Televisi	11	1	12
65	Loudspeaker	3		3
66	Unit Power Supply	7		7
67	Stabilisator	2		2
68	Tangga Aluminium		1	1
69	Dispenser	2		2
70	Mimbar/Podium	1	2	3
71	Gordyin/Kray	1		1
72	Bracket Standing Peralatan	2		2
73	Lampu Hias	3		3
74	Terop		10	10
75	Taplak meja	11		11
76	Pompa Air Kapasitas Rumah Tangga	1		1
77	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4		4
78	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12		12
79	Meja Kerja Pejabat Eselon V	2		2
80	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	3	10
81	Meja Tamu Biasa	3		3
82	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7		7
83	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	11		11
84	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5		5
85	Audio Mixing Console	2		2
86	Audio Amplifier	2		2
87	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	1		1
88	Disc Record Player	1		1
89	Audio Visual	1		1
90	Microphone/Wireless MIC	4		4
91	Microphone Connector Box	2		2
92	Professional Sound System	10	3	13

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
93	Digital Audio Storage System	1		1
94	Sound Insulation (Peredam Suara)	1		1
95	Camera Electronic	2		2
96	Layar Film/Projector	3		3
97	Camera Digital	5		5
98	Web Cam	1		1
99	Handy Cam	1		1
100	Pesawat Telephone	1		1
101	Wireless Amplifier	1	3	4
102	All Band Receiver	1		1
103	APE (Alat Peraga Edukasi)	3		3
104	Mini Komputer	1		1
105	Local Area Network (LAN)	2		2
106	P.C Unit	18		18
107	Lap Top	21		21
108	Note Book	13		13
109	Hard Disk	1		1
110	CPU (Peralatan Personal Komputer)	11		11
111	Monitor	6		6
112	Printer (Peralatan Personal Komputer)	43	2	45
113	Access Point	1		1
114	Bangunan Gedung Kantor Permanen	15		15
115	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1		1
116	Bangunan Gedung Kantor Darurat	1		1
117	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2		2
118	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2		2
119	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1		1
120	Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	2		2
121	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1		1
122	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1		1
123	Bangunan Tempat Parkir	1		1
124	Taman Permanen	1		1
125	Pagar Permanen	2		2
126	Jalan Desa	15		15
127	Talud	4		4
128	Saluran Drainage	4		4
129	Saluran Pembawa Air Baku Terbuka	15		15

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
130	Instalasi Listrik Kantor	4		4
131	Penerangan Jalan Umum	2		2
132	Alat Musik Tradisional/Daerah	2		2
133	Tanaman Hias	1		1

Sumber: Data Inventaris Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, 2025

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Pacitan berada dalam kondisi **layak guna**. Namun masih ada beberapa aset yang mengalami kerusakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu adanya langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak**,** penghapusan aset tidak layak**,** serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Pacitan telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Seksi-Seksi terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja Kecamatan Pacitan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pacitan Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	n/a	Rp5,299,103,385.00	Rp5,034,854,688.00	Rp5,249,163,728.00	Rp5,090,764,782.00	n/a	Rp4,933,707,570.00	Rp4,603,970,834.00	Rp5,091,727,828.00	Rp4,858,717,734.00	n/a	93.10 %	91.44 %	97.00 %	95.44 %	-0.01328080875	-0.00509238585
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	Rp23,704,410.00	Rp22,628,000.00	Rp22,190,955.00	Rp30,515,000.00	n/a	Rp23,516,000.00	Rp22,498,000.00	Rp21,997,000.00	Rp30,116,000.00	n/a	99.21 %	99.43 %	99.13 %	98.69 %	0.08783094343	0.08595362424
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	Rp10,770,955.00	Rp11,150,000.00	n/a	n/a	n/a	Rp10,725,000.00	Rp11,115,000.00	n/a	n/a	n/a	99.57 %	99.69 %	0.03519140101	0.03636363636
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	n/a	n/a	n/a	Rp3,680,000.00	Rp8,560,000.00	n/a	n/a	n/a	Rp3,624,000.00	Rp8,424,000.00	n/a	n/a	n/a	98.48 %	98.41 %	1.326086957	1.324503311
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	n/a	n/a	n/a	Rp3,680,000.00	-	n/a	n/a	n/a	Rp3,624,000.00	-	n/a	n/a	n/a	98.48 %		#VALUE!	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	n/a	n/a	n/a	Rp2,360,000.00	Rp1,270,000.00	n/a	n/a	n/a	Rp2,359,000.00	Rp1,130,000.00	n/a	n/a	n/a	99.96 %	88.98 %	-0.461864407	-0.520983468

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	Rp1,700,000.00	Rp4,005,000.00	n/a	n/a	n/a	Rp1,665,000.00	Rp3,953,000.00	n/a	n/a	n/a	97.94%	98.70%	1.355882353	1.374174174
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	Rp4,298,583,835.00	Rp3,881,444,438.00	Rp3,858,308,113.00	Rp4,446,488,002.00	n/a	Rp3,979,626,021.00	Rp3,503,628,664.00	Rp3,739,158,789.00	Rp4,265,766,482.00	n/a	92.58%	90.27%	96.91%	95.94%	0.011340132	0.023414593
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	n/a	n/a	Rp3,852,108,113.00	Rp4,438,208,002.00	n/a	n/a	n/a	Rp3,733,175,789.00	Rp4,258,003,482.00	n/a	n/a	n/a	96.91%	95.94%	0.152150426	0.140584779
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	n/a	n/a	n/a	Rp2,522,000.00	Rp5,370,000.00	n/a	n/a	n/a	Rp2,447,000.00	Rp4,946,000.00	n/a	n/a	n/a	97.03%	92.10%	1.1292624 9	1.021250511
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n/a	n/a	n/a	Rp1,032,000.00	Rp1,230,000.00	n/a	n/a	n/a	Rp1,032,000.00	Rp1,212,000.00	n/a	n/a	n/a	100.00%	98.54%	0.191860465	0.174418605
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	n/a	n/a	n/a	Rp2,646,000.00	Rp1,680,000.00	n/a	n/a	n/a	Rp2,504,000.00	Rp1,605,000.00	n/a	n/a	n/a	94.63%	95.54%	-0.365079365	-0.359025559
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	Rp55,717,000.00	Rp47,937,400.00	Rp65,389,050.00	Rp46,160,405.00	n/a	Rp54,959,500.00	Rp46,158,639.00	Rp63,357,370.00	Rp39,303,000.00	n/a	98.64%	96.29%	96.89%	85.14%	-0.060794497	-0.105745826

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	n/a	n/a	n/a	Rp61,279,050.00	Rp33,810,405.00	n/a	n/a	n/a	Rp59,487,370.00	Rp28,570,000.00	n/a	n/a	n/a	97.08%	84.50%	-0.44825507	-0.51972998
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	n/a	n/a	n/a	Rp4,110,000.00	Rp12,350,000.00	n/a	n/a	n/a	Rp3,870,000.00	Rp10,733,000.00	n/a	n/a	n/a	94.16%	86.91%	2.0048661	1.77338501 3
Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	Rp473,150,192.00	Rp495,780,194.00	Rp402,881,819.00	Rp216,340,450.00	n/a	Rp464,849,495.00	Rp490,536,630.00	Rp396,174,209.00	Rp208,440,105.00	n/a	98.25%	98.94%	98.34%	96.35%	-0.22960591	-0.23459791 7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	n/a	n/a	n/a	Rp29,861,000.00	Rp14,522,000.00	n/a	n/a	n/a	Rp29,734,990.00	Rp14,425,000.00	n/a	n/a	n/a	99.58%	99.33%	-0.51368005 1	-0.51488129
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	Rp39,053,000.00	Rp83,113,430.00	n/a	n/a	n/a	Rp37,666,858.00	Rp79,681,470.00	n/a	n/a	n/a	96.45%	95.87%	1.12822139 1	1.11542651 1
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	n/a	n/a	n/a	Rp159,520,500.00	Rp63,171,500.00	n/a	n/a	n/a	Rp158,134,485.00	Rp62,971,000.00	n/a	n/a	n/a	99.13%	99.68%	-0.60399133 7	-0.60178831 3
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	n/a	n/a	n/a	Rp21,131,573.00	Rp11,340,000.00	n/a	n/a	n/a	Rp19,420,975.00	Rp7,922,135.00	n/a	n/a	n/a	91.91%	69.86%	-0.46336224	-0.59208355 9
Penyediaan Bahan/Material	n/a	n/a	n/a	Rp142,635,748.00	Rp31,713,520.00	n/a	n/a	n/a	Rp141,776,901.00	Rp31,510,500.00	n/a	n/a	n/a	99.40%	99.36%	-0.77766078 7	-0.77774588 3

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	n/a	n/a	Rp10,480,000.00	Rp12,480,000.00	n/a	n/a	n/a	Rp9,440,000.00	Rp11,930,000.00	n/a	n/a	n/a	90.08%	95.59%	0.1908396 95	0.2637711 86
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	Rp42,788,340.00	Rp33,963,000.00	Rp95,537,270.00	Rp81,221,495.00	n/a	Rp42,263,000.00	Rp33,872,400.00	Rp95,537,270.00	Rp81,221,495.00	n/a	98.77%	99.73%	100.00%	100.00%	0.2381744 76	0.2432836 4
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	n/a	n/a	n/a	Rp95,537,270.00	Rp81,221,495.00	n/a	n/a	n/a	Rp93,120,380.00	Rp76,770,000.00	n/a	n/a	n/a	97.47%	94.52%	-0.1498449 24	-0.1755832 61
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	Rp314,910,708.00	Rp353,559,656.00	Rp656,008,606.00	Rp234,834,430.00	n/a	Rp288,094,554.00	Rp320,752,236.00	Rp644,677,770.00	Rp207,807,947.00	n/a	91.48%	90.72%	98.27%	88.49%	-0.0931722 93	-0.1031722 57
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	n/a	n/a	Rp114,891,298.00	Rp44,987,030.00	n/a	n/a	n/a	Rp106,566,685.00	Rp38,018,156.00	n/a	n/a	n/a	92.75%	84.51%	-0.6084383 17	-0.6432453 91
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	Rp12,215,000.00	Rp5,000,000.00	n/a	n/a	n/a	Rp11,994,300.00	Rp5,000,000.00	n/a	n/a	n/a	98.19%	100.00%	-0.5906672 12	-0.5831353 23
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	n/a	n/a	n/a	Rp528,902,400.00	Rp184,847,400.00	n/a	n/a	n/a	Rp526,116,805.00	Rp164,789,791.00	n/a	n/a	n/a	99.47%	89.15%	-0.6505075 42	-0.6867809 78

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	Rp90,248,900.00	Rp199,542,000.00	Rp148,847,825.00	Rp35,205,000.00	n/a	Rp80,399,000.00	Rp186,524,265.00	Rp133,242,316.00	Rp30,514,200.00	n/a	89.09%	93.48%	89.52%	86.68%	-0.2693307 84	-0.2759801 93
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	n/a	n/a	n/a	Rp50,935,125.00	Rp10,400,000.00	n/a	n/a	n/a	Rp43,370,550.00	Rp7,636,000.00	n/a	n/a	n/a	85.15%	73.42%	-0.7958187 01	-0.8239358 27
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a	n/a	n/a	Rp24,620,000.00	Rp12,180,000.00	n/a	n/a	n/a	Rp16,882,065.00	Rp10,253,200.00	n/a	n/a	n/a	68.57%	84.18%	-0.5052802 6	-0.3926572 37
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	n/a	n/a	n/a	Rp73,292,700.00	Rp12,625,000.00	n/a	n/a	n/a	Rp72,989,700.00	Rp12,625,000.00	n/a	n/a	n/a	99.59%	100.00%	-0.8277454 64	-0.8270303 89
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	n/a	Rp163,994,850.00	Rp402,111,650.00	Rp243,747,240.00	Rp96,235,500.00	n/a	Rp162,499,400.00	Rp398,368,252.25	Rp239,869,972.00	Rp89,903,500.00	n/a	99.09%	99.07%	98.41%	93.42%	-0.1627887 95	-0.1790659 31
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	n/a	Rp17,795,000.00	Rp21,200,000.00	Rp28,900,000.00	Rp37,850,000.00	n/a	Rp17,710,000.00	Rp20,820,000.00	Rp28,631,500.00	Rp37,322,500.00	n/a	99.52%	98.21%	99.07%	98.61%	0.2860444 04	0.2820866 81

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	n/a	n/a	n/a	Rp28,900,000.00	Rp37,850,000.00	n/a	n/a	n/a	Rp28,631,500.00	Rp37,322,500.00	n/a	n/a	n/a	99.07%	98.61%	0.3096885 81	0.3035467 93
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	n/a	Rp146,199,850.00	Rp340,911,650.00	Rp95,537,270.00	Rp37,385,500.00	n/a	Rp144,789,400.00	Rp337,948,252.25	Rp93,120,380.00	Rp33,381,000.00	n/a	99.04%	99.13%	97.47%	89.29%	-0.3652752 66	-0.3868206 44
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	n/a	n/a	n/a	Rp197,347,240.00	Rp37,385,500.00	n/a	n/a	n/a	Rp193,884,972.00	Rp33,381,000.00	n/a	n/a	n/a	98.25%	89.29%	-0.8105598 03	-0.8278309 06
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	n/a	n/a	Rp402,111,650.00	Rp17,500,000.00	Rp15,000,000.00	n/a	n/a	n/a	Rp17,354,800.00	Rp14,940,000.00	n/a	n/a	n/a	99.17%	99.60%	-0.1428571 43	-0.1391430 61

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	n/a	n/a	n/a	Rp17,500,000.00	Rp15,000,000.00	n/a	n/a	n/a	Rp17,354,800.00	Rp14,940,000.00	n/a	n/a	n/a	99.17%	99.60%	-0.14285714 3	-0.13914306 1
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp6,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp4,260,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	71.00%	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	n/a	Rp5,453,810,800.00	Rp5,345,309,100.00	Rp4,762,698,675.00	Rp447,110,526.00	n/a	Rp5,381,844,062.00	Rp5,328,791,365.00	Rp4,744,872,523.00	Rp426,363,500.00	n/a	98.68%	99.69%	99.63%	95.36%	-0.56558487	-0.57051338 2
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	n/a	Rp33,833,800.00	Rp352,494,500.00	Rp363,510,875.00	Rp441,110,526.00	n/a	Rp33,231,400.00	Rp350,174,850.00	Rp353,003,000.00	Rp420,363,500.00	n/a	98.22%	99.34%	97.11%	95.30%	1.353597611	1.330015377
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	n/a	n/a	n/a	Rp27,500,000.00	Rp47,922,295.00	n/a	n/a	n/a	Rp27,206,000.00	Rp40,907,500.00	n/a	n/a	n/a	98.93%	85.36%	0.74262890 9	0.50362052 5

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	n/a	n/a	n/a	Rp336,010,875.00	Rp393,188,231.00	n/a	n/a	n/a	Rp325,797,000.00	Rp379,456,000.00	n/a	n/a	n/a	96.96 %	96.51 %	0.17016519	0.16470071
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	n/a	Rp5,419,977,000.00	Rp4,992,814,600.00	Rp4,399,187,800.00	Rp6,000,000.00	n/a	Rp5,348,612,662.00	Rp4,978,616,515.00	Rp4,391,869,523.00	Rp6,000,000.00	n/a	98.68 %	99.72 %	99.83 %	100.00 %	-0.89655299	-0.89609493
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	n/a	n/a	n/a	Rp8,000,000.00	Rp6,000,000.00	n/a	n/a	n/a	Rp8,000,000.00	Rp6,000,000.00	n/a	n/a	n/a	100.00 %	100.00 %	-0.25	-0.25
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	n/a	n/a	n/a	Rp1,474,235,000.00	-	n/a	n/a	n/a	Rp1,472,573,050.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.89 %		0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	n/a	n/a	n/a	Rp2,916,952,800.00	-	n/a	n/a	n/a	Rp2,913,196,473.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.87 %		0	0
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	n/a	Rp100,000,000.00	Rp24,237,000.00	Rp28,566,000.00	Rp72,033,500.00	n/a	Rp98,081,000.00	Rp24,204,500.00	Rp27,925,000.00	Rp63,350,500.00	n/a	98.08 %	99.87 %	97.76 %	87.95 %	-0.10358006	-0.13558614
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	n/a	Rp100,000,000.00	Rp12,000,000.00	Rp15,650,000.00	Rp60,033,500.00	n/a	Rp98,081,000.00	Rp12,000,000.00	Rp15,280,000.00	Rp51,980,500.00	n/a	98.08 %	100.00 %	97.64 %	86.59 %	-0.15641039	-0.19074537

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Ketertiban Umum																	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Internasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	n/a	n/a	n/a	Rp15,650,000.00	Rp60,033,500.00	n/a	n/a	n/a	Rp15,280,000.00	Rp51,980,500.00	n/a	n/a	n/a	97.64%	86.59%	2.8360063	2.4018651 83
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	n/a	n/a	Rp12,237,000.00	Rp12,916,000.00	Rp12,000,000.00	n/a	n/a	Rp12,204,500.00	Rp12,645,000.00	Rp11,370,000.00	n/a	n/a	99.73%	97.90%	94.75%	-0.0097310 93	-0.0347935 03
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	n/a	n/a	n/a	Rp12,916,000.00	Rp12,000,000.00	n/a	n/a	n/a	Rp12,645,000.00	Rp11,370,000.00	n/a	n/a	n/a	97.90%	94.75%	-0.0709197 89	-0.1008303 68

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Republik Indonesia																	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	n/a	Rp23,980,500.00	Rp55,200,000.00	Rp61,200,000.00	Rp66,600,000.00	n/a	Rp23,219,500.00	Rp54,991,000.00	Rp55,265,000.00	Rp65,336,000.00	n/a	96.83%	99.62%	90.30%	98.10%	0.4056331 74	0.4117784 87
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepada Daerah	n/a	Rp23,980,500.00	Rp55,200,000.00	Rp61,200,000.00	Rp66,600,000.00	n/a	Rp23,219,500.00	Rp54,991,000.00	Rp55,265,000.00	Rp65,336,000.00	n/a	96.83%	99.62%	90.30%	98.10%	0.4056331 74	0.4117784 87
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	n/a	n/a	n/a	Rp32,000,000.00	Rp51,000,000.00	n/a	n/a	n/a	Rp30,914,000.00	Rp49,736,000.00	n/a	n/a	n/a	96.61%	97.52%	0.59375	0.6088503 59
Pembinaan Forum-Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	n/a	n/a	n/a	Rp29,200,000.00	Rp15,600,000.00	n/a	n/a	n/a	Rp24,351,000.00	Rp15,600,000.00	n/a	n/a	n/a	83.39%	100.00%	-0.4657534 25	-0.3593692 25

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	n/a	Rp38,461,300.00	Rp64,094,000.00	Rp81,600,000.00	Rp96,529,185.00	n/a	Rp37,392,500.00	Rp60,551,500.00	Rp81,114,000.00	Rp94,342,800.00	n/a	97.22%	94.47%	99.40%	97.74%	0.3589752 9	0.3613655 4
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	n/a	Rp38,461,300.00	Rp64,094,000.00	Rp81,600,000.00	Rp96,529,185.00	n/a	Rp37,392,500.00	Rp60,551,500.00	Rp81,114,000.00	Rp94,342,800.00	n/a	97.22%	94.47%	99.40%	97.74%	0.3589752 9	0.3613655 4
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	n/a	n/a	n/a	Rp63,650,000.00	Rp60,208,729.00	n/a	n/a	n/a	Rp63,208,500.00	Rp58,507,800.00	n/a	n/a	n/a	99.31%	97.17%	-0.0540655 3	-0.0743681 63
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	n/a	n/a	n/a	Rp17,950,000.00	-	n/a	n/a	n/a	Rp17,905,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.75%	n/a	0	0
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp36,320,456.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp35,835,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	98.66%	0	0
KELURAHAN SIDOHARJO																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp294,792,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp285,720,363.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**96.92%**	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp4,149,180.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp4,100,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**98.81 %**	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp4,149,180.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp4,100,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	98.81 %	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp60,240,045.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp58,115,802.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**96.47 %**	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp2,333,110.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp2,320,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.44 %	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp2,209,455.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp1,862,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	84.30 %	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp25,530,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp24,923,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	97.62 %	0	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp3,060,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp2,917,802.00	n/a	n/a	n/a	n/a	95.35 %	0	0
Penyediaan Bahan/Material	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp27,107,480.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp26,092,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	96.26 %	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp69,315,675.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp69,265,780.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.93 %	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp69,315,675.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp69,265,780.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.93 %	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp129,307,400.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp124,569,406.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**96.34 %**	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp14,960,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp10,902,730.00	n/a	n/a	n/a	n/a	72.88 %	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp1,500,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp1,050,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	70.00 %	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp112,847,400.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp112,616,676.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**99.80 %**	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp31,779,700.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp29,669,375.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**93.36 %**	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp8,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp6,901,750.00	n/a	n/a	n/a	n/a	86.27%	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp3,810,900.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp3,041,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	79.80%	0	0
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp19,968,800.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp19,726,625.00	n/a	n/a	n/a	n/a	98.79%	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp19,100,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp19,100,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00%	0	0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp19,100,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp19,100,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**100.00%**	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp19,100,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp19,100,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00 %	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp1,141,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp1,137,963,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.73 %	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp1,141,000,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp1,137,963,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**99.73 %**	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp422,830,950.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp422,113,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.83 %	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp718,169,050.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp715,850,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.68 %	0	0
KELUARAHAN PLOSO																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp208,248,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp204,559,598.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**98.23 %**	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp10,500,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp10,386,200.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**98.92 %**	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp10,500,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp10,386,200.00	n/a	n/a	n/a	n/a	98.92 %	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp59,700,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp59,451,500.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**99.58 %**	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp9,292,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp9,275,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.82 %	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp11,380,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp11,367,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.89 %	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp22,277,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp22,154,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.45 %	0	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp2,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp1,990,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.53 %	0	0
Penyediaan Bahan/Material	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp14,750,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp14,663,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.41 %	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp7,131,500.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp6,961,140.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**97.61 %**	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp7,131,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp6,961,140.00	n/a	n/a	n/a	n/a	97.61%	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp113,548,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp110,556,258.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**97.37%**	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp10,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp7,508,044.00	n/a	n/a	n/a	n/a	75.08%	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp300,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp300,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00%	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp103,248,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp102,748,214.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**99.52%**	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp17,368,500.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp17,204,500.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**99.06%**	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp2,500,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp2,442,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	97.70%	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp2,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp1,910,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	95.50%	0	0
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp12,868,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp12,852,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.87%	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp15,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp14,837,400.00	n/a	n/a	n/a	n/a	98.92%	0	0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp15,000,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp14,837,400.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**98.92%**	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp15,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp14,837,400.00	n/a	n/a	n/a	n/a	98.92 %	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp1,277,519,200.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp1,274,799,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.79 %	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp1,277,519,200.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp1,274,799,500.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**99.79 %**	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp350,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp350,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00 %	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp927,519,200.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp924,799,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.71 %	0	0
KELURAHAN BALEHARJO																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp136,060,760.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp134,493,806.00	n/a	n/a	n/a	n/a	98.85 %	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp6,125,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp6,066,950.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**99.05 %**	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp6,125,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp6,066,950.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.05 %	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp37,840,759.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp37,746,500.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**99.75 %**	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp4,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp3,997,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.94 %	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp4,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp4,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00 %	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp12,620,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp12,571,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.62 %	0	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp936,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp936,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00 %	0	0
Penyediaan Bahan/Material	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp16,284,759.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp16,241,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.73 %	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp3,972,500.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp3,850,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**96.92 %**	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp3,972,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp3,850,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	96.92 %	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp76,641,501.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp75,556,056.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**98.58 %**	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp20,368,001.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp19,351,139.00	n/a	n/a	n/a	n/a	95.01 %	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp1,655,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp1,655,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00 %	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp54,618,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp54,549,917.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.87 %	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp11,481,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp11,274,300.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**98.20 %**	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp751,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp560,300.00	n/a	n/a	n/a	n/a	74.61 %	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp730,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp730,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00 %	0	0
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp10,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp9,984,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.84 %	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp16,563,240.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp16,523,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.76 %	0	0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp16,563,240.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp16,523,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**99.76 %**	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp16,563,240.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp16,523,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.76 %	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp895,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp888,795,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.31 %	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp895,000,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp888,795,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**99.31 %**	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp265,464,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp265,438,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.99 %	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp629,536,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp623,357,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.02 %	0	0
KELURAHAN PUCANGSEWU																	
KELURAHAN PACITAN	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp152,164,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp147,532,708.00	n/a	n/a	n/a	n/a	96.96 %	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp5,534,460.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp5,354,983.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**96.76 %**	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp5,534,460.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp5,354,983.00	n/a	n/a	n/a	n/a	96.76%	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp24,917,940.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp24,740,796.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**99.29%**	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp1,024,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp1,022,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.80%	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp4,348,445.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp4,330,745.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.59%	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp11,106,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp11,037,705.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.39%	0	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp1,018,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp1,014,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.61%	0	0
Penyediaan Bahan/Material	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp7,421,495.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp7,336,346.00	n/a	n/a	n/a	n/a	98.85%	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp0.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp0.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**#DIV/0!**	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp0.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp0.00	n/a	n/a	n/a	n/a	#DIV/0!	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp86,456,600.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp83,113,029.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**96.13 %**	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp20,443,800.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp17,346,932.00	n/a	n/a	n/a	n/a	84.85 %	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp500,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp500,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00 %	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp65,512,800.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp65,266,097.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**99.62 %**	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp35,255,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp34,323,900.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**97.36 %**	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp4,415,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp3,483,900.00	n/a	n/a	n/a	n/a	78.91 %	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp2,840,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp2,840,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00 %	0	0
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp28,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp28,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00 %	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp5,060,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp5,060,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00 %	0	0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp5,060,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp5,060,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**100.00 %**	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Anggaran**	**Realisasi**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp5,060,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp5,060,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00%	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp895,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp892,791,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.75%	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp895,000,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp892,791,500.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**99.75%**	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp250,230,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp250,230,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00%	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp644,770,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp642,561,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.66%	0	0
KELURAHAN BALEHARJO																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp158,240,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp147,820,468.00	n/a	n/a	n/a	n/a	93.42%	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp2,500,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp2,470,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**98.80%**	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp2,500,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp2,470,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	98.80%	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp43,744,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp41,648,510.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**95.21%**	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp5,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp3,904,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	78.09%	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp3,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp2,385,800.00	n/a	n/a	n/a	n/a	79.53%	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp21,620,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp21,497,360.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.43%	0	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp4,124,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp3,980,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	96.52%	0	0
Penyediaan Bahan/Material	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp10,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp9,880,350.00	n/a	n/a	n/a	n/a	98.80%	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp10,000,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp9,797,060.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**97.97%**	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp10,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp9,797,060.00	n/a	n/a	n/a	n/a	97.97 %	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp81,000,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp76,508,148.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**94.45 %**	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp20,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp16,130,848.00	n/a	n/a	n/a	n/a	80.65 %	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp5,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp4,377,300.00	n/a	n/a	n/a	n/a	87.55 %	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp56,000,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp56,000,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**100.00 %**	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp20,996,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp17,396,750.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**82.86 %**	0	0

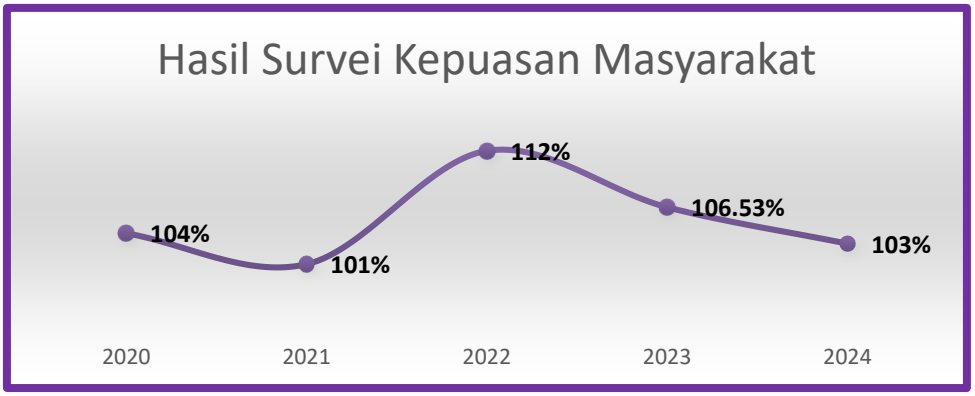
Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp11,496,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp8,697,150.00	n/a	n/a	n/a	n/a	75.65 %	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp3,500,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp2,745,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	78.43 %	0	0
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp6,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp5,954,600.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.24 %	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp2,384,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp1,313,416.00	n/a	n/a	n/a	n/a	55.09 %	0	0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp2,384,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp1,313,416.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**55.09 %**	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Anggaran**	**Realisasi**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp2,384,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp1,313,416.00	n/a	n/a	n/a	n/a	55.09%	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp933,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp922,300,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	98.85%	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp933,000,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**Rp922,300,000.00**	n/a	n/a	n/a	n/a	**98.85%**	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp233,495,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp233,495,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00%	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp699,505,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp688,805,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	98.47%	0	0

Sumber: Data Capaian dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 2020-2024.

Berdasarkan data capaian dan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Pacitan selama periode tahun 2020 hingga 2024, dapat diketahui bahwa kinerja pelayanan publik secara umum menunjukkan tren positif dan konsisten dalam mencapai maupun melampaui target yang telah ditetapkan. Tiga indikator utama yang digunakan dalam mengukur kinerja kecamatan tersebut adalah hasil survei kepuasan masyarakat, persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi fasilitasi dalam bidang pemerintahan dan pelayanan umum, serta persentase desa yang telah menyusun administrasi sesuai ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.

Gambar 2.3 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kecamatan Pacitan 2020-2024

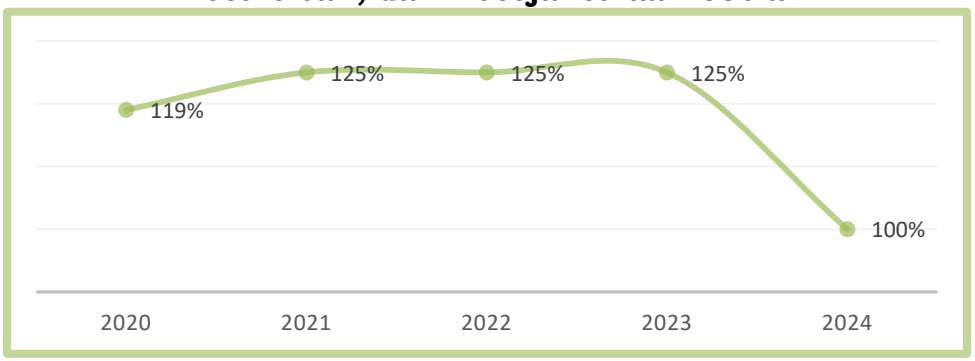


Sumber: Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 2020-2024

Hasil survei kepuasan masyarakat yang menjadi indikator pertama mengalami peningkatan dari sisi target dan realisasi. Target kinerja pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 82 dan naik secara bertahap dengan target akhir periode sebesar 86,60 pada tahun 2024. Dilihat dari realisasinya, Kecamatan Pacitan menunjukkan layanan kepuasan masyarakat yang tinggi. Hal ini dapat dilihat pada realisasi tahun 2020 hingga 2024 yang melebihi 100%. Capaian kinerja ini menunjukkan angka yang relatif tinggi, bahkan sempat mencapai puncaknya di tahun 2023 dengan capaian sebesar 106,53%, sebelum

sedikit menurun menjadi 103% di tahun 2024. Penurunan capaian ini bukan berarti terjadi kemunduran kinerja, melainkan lebih merefleksikan semakin meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima. Semakin baik kualitas layanan yang diberikan, masyarakat cenderung memiliki standar penilaian yang juga semakin tinggi. Hal ini menjadi sinyal penting bahwa meskipun nilai realisasi meningkat, tingkat kepuasan masyarakat bisa saja stagnan atau bahkan menurun apabila tidak disertai inovasi yang dirasakan secara langsung oleh pengguna layanan.

Gambar 2.4 Persentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun Bidang: Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, dan Kesejahteraan Sosial

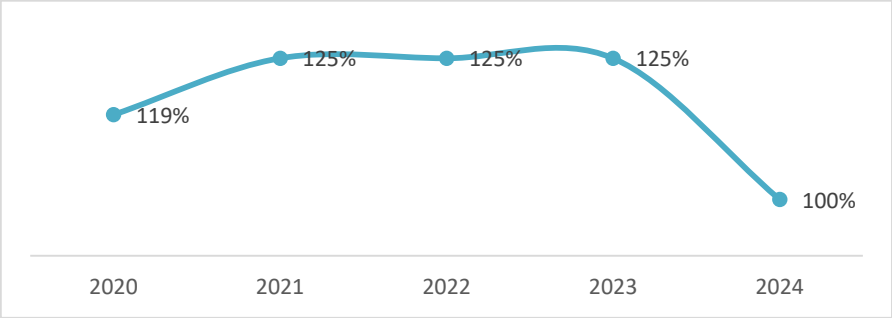


Sumber: Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 2020-2024

Indikator kinerja Kecamatan yang kedua, yaitu persentase rekomendasi fasilitasi yang ditindaklanjuti, menunjukkan kinerja yang sangat stabil dan optimal. Target selama periode 2020–2024 dirancang dengan kenaikan bertahap, dengan target akhir periode sebesar 100% pada tahun 2024. Realisasi kinerja dari indikator ini mencapai 100% setiap tahunnya, yang menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen tinggi dari aparatur Kecamatan dalam menindaklanjuti rekomendasi fasilitasi lintas bidang seperti pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, dan kesejahteraan sosial.

Capaian kinerja indikator ini bahkan mencapai angka 125% selama tiga tahun berturut-turut (2021–2023), yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja melebihi target yang telah ditetapkan. Penurunan capaian menjadi 100% pada tahun 2024 sepenuhnya disebabkan oleh dinaikkannya target ke angka maksimum, bukan karena penurunan realisasi, sehingga tetap mencerminkan kinerja yang sangat baik.

Gambar 2.5 Persentase Desa yang Sudah Menyusun Administrasi Sesuai dengan Ketentuan Dokumen: Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan



Sumber: Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 2020-2024

Indikator ketiga, yaitu persentase desa yang telah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, juga menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan. Pola capaian indikator ini hampir identik dengan indikator kedua. di mana target awal ditetapkan sebesar 80% ditingkatkan menjadi 100% pada tahun 2024. Realisasi kinerja sejak tahun 2021 terus mencapai angka 100%, menandakan bahwa seluruh desa di Kecamatan Pacitan telah menjalankan proses administrasi secara tertib dan sesuai regulasi yang berlaku. Capaian kinerja pada indikator ini bahkan menunjukkan angka 125% selama tiga tahun berturut-turut, menandakan bahwa sebagian besar desa telah melampaui target administrasi yang ditetapkan secara kuantitatif. Seperti indikator kedua, capaian di tahun 2024 menurun menjadi 100% karena target telah dinaikkan ke angka maksimal.

Dari analisis ini, dapat dipahami bahwa kinerja Kecamatan Pacitan secara umum menunjukkan stabilitas yang sangat baik, terutama dalam hal tindak lanjut rekomendasi dan penyusunan administrasi desa. Namun demikian, satu aspek yang memerlukan perhatian lebih adalah fluktuasi capaian pada indikator kepuasan masyarakat. Meskipun angka realisasi meningkat, tingkat capaian kinerja pada 2024 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas pelayanan yang diterima masyarakat belum sepenuhnya memenuhi harapan yang semakin berkembang. Oleh karena itu, pemerintah kecamatan perlu menelaah lebih jauh faktor-faktor penyebabnya, baik dari aspek teknis seperti kecepatan dan kejelasan prosedur pelayanan, maupun dari aspek non-teknis seperti keramahan petugas, transparansi informasi, dan kemudahan akses.

Kesimpulannya, kinerja pelayanan Kecamatan Pacitan selama lima tahun terakhir dapat dikategorikan sangat baik, dengan pencapaian target yang konsisten bahkan melebihi ekspektasi pada beberapa indikator. Namun demikian, keberhasilan ini perlu dilengkapi dengan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih menyentuh aspek pengalaman pengguna, sehingga kepuasan masyarakat tidak hanya sekadar meningkat secara angka, tetapi juga terasa dalam keseharian mereka sebagai penerima layanan publik. Pendekatan inovatif, evaluasi berkala, dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan akan menjadi kunci untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja yang berkelanjutan.

Tabel 2.4 Pagu dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pacitan Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp5,299,103,385.00	Rp5,034,854,688.00	Rp5,249,163,728.00	Rp5,090,764,782.00		Rp4,933,707,570.00	Rp4,603,970,834.00	Rp5,091,727,828.00	Rp4,858,717,734.00		93.10%	91.44%	97.00%	95.44%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp23,704,410.00	Rp22,628,000.00	Rp22,190,955.00	Rp30,515,000.00		Rp23,516,000.00	Rp22,498,000.00	Rp21,997,000.00	Rp30,116,000.00		99.21%	99.43%	99.13%	98.69%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	Rp10,770,955.00	Rp11,150,000.00		-	-	Rp10,725,000.00	Rp11,115,000.00				99.57%	99.69%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	-	Rp3,680,000.00	Rp8,560,000.00		-	-	Rp3,624,000.00	Rp8,424,000.00				98.48%	98.41%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		-	-	Rp3,680,000.00	-		-	-	Rp3,624,000.00	-				98.48%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	-	Rp2,360,000.00	Rp1,270,000.00			-	Rp2,359,000.00	Rp1,130,000.00				99.96%	88.98%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	Rp1,700,000.00	Rp4,005,000.00		-	-	Rp1,665,000.00	Rp3,953,000.00				97.94%	98.70%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp4,298,583,835.00	Rp3,881,444,438.00	Rp3,858,308,113.00	Rp4,446,488,002.00		Rp3,979,626,021.00	Rp3,503,628,664.00	Rp3,739,158,789.00	Rp4,265,766,482.00		92.58%	90.27%	96.91%	95.94%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	Rp3,852,108,113.00	Rp4,438,208,002.00		-	-	Rp3,733,175,789.00	Rp4,258,003,482.00				96.91%	95.94%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		-	-	Rp2,522,000.00	Rp5,370,000.00		-	-	Rp2,447,000.00	Rp4,946,000.00				97.03%	92.10%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-	-	Rp1,032,000.00	Rp1,230,000.00		-	-	Rp1,032,000.00	Rp1,212,000.00				100.00%	98.54%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		-	-	Rp2,646,000.00	Rp1,680,000.00		-	-	Rp2,504,000.00	Rp1,605,000.00				94.63%	95.54%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp55,717,000.00	Rp47,937,400.00	Rp65,389,050.00	Rp46,160,405.00		Rp54,959,500.00	Rp46,158,639.00	Rp63,357,370.00	Rp39,303,000.00		98.64%	96.29%	96.89%	85.14%

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-	-	Rp61,279,050.00	Rp33,810,405.00		-	-	Rp59,487,370.00	Rp28,570,000.00				97.08%	84.50%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	-	Rp4,110,000.00	Rp12,350,000.00		-	-	Rp3,870,000.00	Rp10,733,000.00				94.16%	86.91%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp473,150,192.00	Rp495,780,194.00	Rp402,881,819.00	Rp216,340,450.00		Rp464,849,495.00	Rp490,536,630.00	Rp396,174,209.00	Rp208,440,105.00		98.25%	98.94%	98.34%	96.35%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-	-	Rp29,861,000.00	Rp14,522,000.00		-	-	Rp29,734,990.00	Rp14,425,000.00				99.58%	99.33%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	Rp39,053,000.00	Rp83,113,430.00		-	-	Rp37,666,858.00	Rp79,681,470.00				96.45%	95.87%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		-	-	Rp159,520,500.00	Rp63,171,500.00		-	-	Rp158,134,485.00	Rp62,971,000.00				99.13%	99.68%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		-	-	Rp21,131,573.00	Rp11,340,000.00		-	-	Rp19,420,975.00	Rp7,922,135.00				91.91%	69.86%
Penyediaan Bahan/Material		-	-	Rp142,635,748.00	Rp31,713,520.00		-	-	Rp141,776,901.00	Rp31,510,500.00				99.40%	99.36%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	-	Rp10,480,000.00	Rp12,480,000.00		-	-	Rp9,440,000.00	Rp11,930,000.00				90.08%	95.59%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp42,788,340.00	Rp33,963,000.00	Rp95,537,270.00	Rp81,221,495.00		Rp42,263,000.00	Rp33,872,400.00	Rp95,537,270.00	Rp81,221,495.00		98.77%	99.73%	100.00%	100.00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	Rp95,537,270.00	Rp81,221,495.00		-	-	Rp93,120,380.00	Rp76,770,000.00				97.47%	94.52%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp314,910,708.00	Rp353,559,656.00	Rp656,008,606.00	Rp234,834,430.00		Rp288,094,554.00	Rp320,752,236.00	Rp644,677,770.00	Rp207,807,947.00		91.48%	90.72%	98.27%	88.49%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Rp114,891,298.00	Rp44,987,030.00				Rp106,566,685.00	Rp38,018,156.00				92.75%	84.51%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Rp12,215,000.00	Rp5,000,000.00				Rp11,994,300.00	Rp5,000,000.00				98.19%	100.00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Rp528,902,400.00	Rp184,847,400.00				Rp526,116,805.00	Rp164,789,791.00				99.47%	89.15%

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp90,248,900.00	Rp199,542,000.00	Rp148,847,825.00	Rp35,205,000.00		Rp80,399,000.00	Rp186,524,265.00	Rp133,242,316.00	Rp30,514,200.00		89.09%	93.48%	89.52%	86.68%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	-	Rp50,935,125.00	Rp10,400,000.00		-	-	Rp43,370,550.00	Rp7,636,000.00				85.15%	73.42%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-	Rp24,620,000.00	Rp12,180,000.00		-	-	Rp16,882,065.00	Rp10,253,200.00				68.57%	84.18%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	-	Rp73,292,700.00	Rp12,625,000.00		-	-	Rp72,989,700.00	Rp12,625,000.00				99.59%	100.00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp163,994,850.00	Rp402,111,650.00	Rp243,747,240.00	Rp96,235,500.00		Rp162,499,400.00	Rp398,368,252.25	Rp239,869,972.00	Rp89,903,500.00		99.09%	99.07%	98.41%	93.42%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Rp17,795,000.00	Rp21,200,000.00	Rp28,900,000.00	Rp37,850,000.00		Rp17,710,000.00	Rp20,820,000.00	Rp28,631,500.00	Rp37,322,500.00		99.52%	98.21%	99.07%	98.61%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		-	-	Rp28,900,000.00	Rp37,850,000.00		-	-	Rp28,631,500.00	Rp37,322,500.00				99.07%	98.61%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Rp146,199,850.00	Rp340,911,650.00	Rp95,537,270.00	Rp37,385,500.00		Rp144,789,400.00	Rp337,948,252.25	Rp93,120,380.00	Rp33,381,000.00		99.04%	99.13%	97.47%	89.29%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		-	-	Rp197,347,240.00	Rp37,385,500.00		-	-	Rp193,884,972.00	Rp33,381,000.00				98.25%	89.29%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		-	Rp402,111,650.00	Rp17,500,000.00	Rp15,000,000.00		-	-	Rp17,354,800.00	Rp14,940,000.00				99.17%	99.60%
Koordinasi Pemeliharaan		-	-	Rp17,500,000.00	Rp15,000,000.00		-	-	Rp17,354,800.00	Rp14,940,000.00				99.17%	99.60%

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															
		-	-	-	Rp6,000,000.00		-	-	-	Rp4,260,000.00					71.00%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		-	-	-	Rp6,000,000.00		-	-	-	Rp4,260,000.00					71.00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp5,453,810,800.00	Rp5,345,309,100.00	Rp4,762,698,675.00	Rp447,110,526.00		Rp5,381,844,062.00	Rp5,328,791,365.00	Rp4,744,872,523.00	Rp426,363,500.00		98.68%	99.69%	99.63%	95.36%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Rp33,833,800.00	Rp352,494,500.00	Rp363,510,875.00	Rp441,110,526.00		Rp33,231,400.00	Rp350,174,850.00	Rp353,003,000.00	Rp420,363,500.00		98.22%	99.34%	97.11%	95.30%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		-	-	Rp27,500,000.00	Rp47,922,295.00		-	-	Rp27,206,000.00	Rp40,907,500.00				98.93%	85.36%
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		-	-	Rp336,010,875.00	Rp393,188,231.00		-	-	Rp325,797,000.00	Rp379,456,000.00				96.96%	96.51%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Rp5,419,977,000.00	Rp4,992,814,600.00	Rp4,399,187,800.00	Rp6,000,000.00		Rp5,348,612,662.00	Rp4,978,616,515.00	Rp4,391,869,523.00	Rp6,000,000.00		98.68%	99.72%	99.83%	100.00%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		-	-	Rp8,000,000.00	Rp6,000,000.00		-	-	Rp8,000,000.00	Rp6,000,000.00				100.00%	100.00%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan		-	-	Rp1,474,235,000.00	-		-	-	Rp1,472,573,050.00	-				99.89%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		-	-	Rp2,916,952,800.00	-		-	-	Rp2,913,196,473.00	-				99.87%	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp100,000,000.00	Rp24,237,000.00	Rp28,566,000.00	Rp72,033,500.00		Rp98,081,000.00	Rp24,204,500.00	Rp27,925,000.00	Rp63,350,500.00		98.08%	99.87%	97.76%	87.95%

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Rp100,000,000.00	Rp12,000,000.00	Rp15,650,000.00	Rp60,033,500.00		Rp98,081,000.00	Rp12,000,000.00	Rp15,280,000.00	Rp51,980,500.00		98.08%	100.00%	97.64%	86.59%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Internasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		-	-	Rp15,650,000.00	Rp60,033,500.00		-	-	Rp15,280,000.00	Rp51,980,500.00				97.64%	86.59%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		-	Rp12,237,000.00	Rp12,916,000.00	Rp12,000,000.00		-	Rp12,204,500.00	Rp12,645,000.00	Rp11,370,000.00			99.73%	97.90%	94.75%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		-	-	Rp12,916,000.00	Rp12,000,000.00		-	-	Rp12,645,000.00	Rp11,370,000.00				97.90%	94.75%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp23,980,500.00	Rp55,200,000.00	Rp61,200,000.00	Rp66,600,000.00		Rp23,219,500.00	Rp54,991,000.00	Rp55,265,000.00	Rp65,336,000.00		96.83%	99.62%	90.30%	98.10%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepada Daerah		Rp23,980,500.00	Rp55,200,000.00	Rp61,200,000.00	Rp66,600,000.00		Rp23,219,500.00	Rp54,991,000.00	Rp55,265,000.00	Rp65,336,000.00		96.83%	99.62%	90.30%	98.10%
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				Rp32,000,000.00	Rp51,000,000.00				Rp30,914,000.00	Rp49,736,000.00				96.61%	97.52%
Pembinaan Forum-Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Rp29,200,000.00	Rp15,600,000.00				Rp24,351,000.00	Rp15,600,000.00				83.39%	100.00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp38,461,300.00	Rp64,094,000.00	Rp81,600,000.00	Rp96,529,185.00		Rp37,392,500.00	Rp60,551,500.00	Rp81,114,000.00	Rp94,342,800.00		97.22%	94.47%	99.40%	97.74%
Fasilitasi, Rekomendasi dan		Rp38,461,300.00	Rp64,094,000.00	Rp81,600,000.00	Rp96,529,185.00		Rp37,392,500.00	Rp60,551,500.00	Rp81,114,000.00	Rp94,342,800.00		97.22%	94.47%	99.40%	97.74%

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa															
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		-	-	Rp63,650,000.00	Rp60,208,729.00				Rp63,208,500.00	Rp58,507,800.00				99.31 %	97.17 %
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	-	Rp17,950,000.00	-				Rp17,905,500.00	-				99.75 %	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		-	-	-	Rp36,320,456.00					Rp35,835,000.00					98.66 %
KELURAHAN SIDOHARJO															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**Rp294,792,000.00**					**Rp285,720,363.00**					**96.92 %**
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**Rp4,149,180.00**					**Rp4,100,000.00**					**98.81 %**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Rp4,149,180.00					Rp4,100,000.00					98.81 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Rp60,240,045.00**					**Rp58,115,802.00**					**96.47 %**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Rp2,333,110.00					Rp2,320,000.00					99.44 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp2,209,455.00					Rp1,862,500.00					84.30 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp25,530,000.00					Rp24,923,000.00					97.62 %
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Rp3,060,000.00					Rp2,917,802.00					95.35 %
Penyediaan Bahan/Material					Rp27,107,480.00					Rp26,092,500.00					96.26 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp69,315,675.00					Rp69,265,780.00					99.93 %
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung					Rp69,315,675.00					Rp69,265,780.00					99.93 %

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kantor atau Bangunan Lainnya															
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Rp129,307,400.00**					**Rp124,569,406.00**					**96.34 %**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp14,960,000.00					Rp10,902,730.00					72.88 %
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp1,500,000.00					Rp1,050,000.00					70.00 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					**Rp112,847,400.00**					**Rp112,616,676.00**					**99.80 %**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Rp31,779,700.00**					**Rp29,669,375.00**					**93.36 %**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp8,000,000.00					Rp6,901,750.00					86.27 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp3,810,900.00					Rp3,041,000.00					79.80 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp19,968,800.00					Rp19,726,625.00					98.79 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Rp19,100,000.00					Rp19,100,000.00					100.00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					**Rp19,100,000.00**					**Rp19,100,000.00**					**100.00%**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Rp19,100,000.00					Rp19,100,000.00					100.00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN					Rp1,141,000,000.00					Rp1,137,963,000.00					99.73 %

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					**Rp1,141,000,000.00**					**Rp1,137,963,000.00**					**99.73 %**
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Rp422,830,950.00					Rp422,113,000.00					99.83 %
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Rp718,169,050.00					Rp715,850,000.00					99.68 %
KELUARAHAN PLOSO															#DIV/0!
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**Rp208,248,000.00**					**Rp204,559,598.00**					**98.23 %**
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**Rp10,500,000.00**					**Rp10,386,200.00**					**98.92 %**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Rp10,500,000.00					Rp10,386,200.00					98.92 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Rp59,700,000.00**					**Rp59,451,500.00**					**99.58 %**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Rp9,292,000.00					Rp9,275,500.00					99.82 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp11,380,500.00					Rp11,367,500.00					99.89 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp22,277,500.00					Rp22,154,500.00					99.45 %
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Rp2,000,000.00					Rp1,990,500.00					99.53 %
Penyediaan Bahan/Material					Rp14,750,000.00					Rp14,663,500.00					99.41 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Rp7,131,500.00**					**Rp6,961,140.00**					**97.61 %**
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung					Rp7,131,500.00					Rp6,961,140.00					97.61 %

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kantor atau Bangunan Lainnya															
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Rp113,548,000.00**					**Rp110,556,258.00**					**97.37 %**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp10,000,000.00					Rp7,508,044.00					75.08 %
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp300,000.00					Rp300,000.00					100.00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					**Rp103,248,000.00**					**Rp102,748,214.00**					**99.52 %**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Rp17,368,500.00**					**Rp17,204,500.00**					**99.06 %**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp2,500,000.00					Rp2,442,500.00					97.70 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp2,000,000.00					Rp1,910,000.00					95.50 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp12,868,500.00					Rp12,852,000.00					99.87 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Rp15,000,000.00					Rp14,837,400.00					98.92 %
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					**Rp15,000,000.00**					**Rp14,837,400.00**					**98.92 %**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Rp15,000,000.00					Rp14,837,400.00					98.92 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN					Rp1,277,519,200.00					Rp1,274,799,500.00					99.79 %

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					**Rp1,277,519,200.00**					**Rp1,274,799,500.00**					**99.79 %**
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Rp350,000,000.00					Rp350,000,000.00					100.00%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Rp927,519,200.00					Rp924,799,500.00					99.71 %
KELURAHAN BALEHARJO															#DIV/0!
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp136,060,760.00					Rp134,493,806.00					98.85 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**Rp6,125,000.00**					**Rp6,066,950.00**					**99.05 %**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Rp6,125,000.00					Rp6,066,950.00					99.05 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Rp37,840,759.00**					**Rp37,746,500.00**					**99.75 %**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Rp4,000,000.00					Rp3,997,500.00					99.94 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp4,000,000.00					Rp4,000,000.00					100.00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp12,620,000.00					Rp12,571,500.00					99.62 %
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Rp936,000.00					Rp936,000.00					100.00%
Penyediaan Bahan/Material					Rp16,284,759.00					Rp16,241,500.00					99.73 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Rp3,972,500.00**					**Rp3,850,000.00**					**96.92 %**
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung					Rp3,972,500.00					Rp3,850,000.00					96.92 %

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kantor atau Bangunan Lainnya															
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Rp76,641,501.00**					**Rp75,556,056.00**					**98.58 %**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp20,368,001.00					Rp19,351,139.00					95.01 %
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp1,655,000.00					Rp1,655,000.00					100.00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp54,618,500.00					Rp54,549,917.00					99.87 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Rp11,481,000.00**					**Rp11,274,300.00**					**98.20 %**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp751,000.00					Rp560,300.00					74.61 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp730,000.00					Rp730,000.00					100.00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp10,000,000.00					Rp9,984,000.00					99.84 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Rp16,563,240.00					Rp16,523,000.00					99.76 %
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					**Rp16,563,240.00**					**Rp16,523,000.00**					**99.76 %**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Rp16,563,240.00					Rp16,523,000.00					99.76 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN					Rp895,000,000.00					Rp888,795,000.00					99.31 %

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					**Rp895,000,000.00**					**Rp888,795,000.00**					**99.31 %**
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Rp265,464,000.00					Rp265,438,000.00					99.99 %
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Rp629,536,000.00					Rp623,357,000.00					99.02 %
KELURAHAN PUCANGSEWU															#DIV/0!
KELURAHAN PACITAN					Rp152,164,000.00					Rp147,532,708.00					96.96 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**Rp5,534,460.00**					**Rp5,354,983.00**					**96.76 %**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Rp5,534,460.00					Rp5,354,983.00					96.76 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Rp24,917,940.00**					**Rp24,740,796.00**					**99.29 %**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Rp1,024,000.00					Rp1,022,000.00					99.80 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp4,348,445.00					Rp4,330,745.00					99.59 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp11,106,000.00					Rp11,037,705.00					99.39 %
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Rp1,018,000.00					Rp1,014,000.00					99.61 %
Penyediaan Bahan/Material					Rp7,421,495.00					Rp7,336,346.00					98.85 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Rp0.00**					**Rp0.00**					**#DIV/0!**
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Rp0.00					Rp0.00					#DIV/0!

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Rp86,456,600.00**					**Rp83,113,029.00**					**96.13 %**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp20,443,800.00					Rp17,346,932.00					84.85 %
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp500,000.00					Rp500,000.00					100.00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					**Rp65,512,800.00**					**Rp65,266,097.00**					**99.62 %**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Rp35,255,000.00**					**Rp34,323,900.00**					**97.36 %**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp4,415,000.00					Rp3,483,900.00					78.91 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp2,840,000.00					Rp2,840,000.00					100.00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp28,000,000.00					Rp28,000,000.00					100.00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Rp5,060,000.00					Rp5,060,000.00					100.00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					**Rp5,060,000.00**					**Rp5,060,000.00**					**100.00%**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Rp5,060,000.00					Rp5,060,000.00					100.00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Rp895,000,000.00					Rp892,791,500.00					99.75 %

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					**Rp895,000,000.00**					**Rp892,791,500.00**					**99.75 %**
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Rp250,230,000.00					Rp250,230,000.00					100.00%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Rp644,770,000.00					Rp642,561,500.00					99.66 %
KELURAHAN BALEHARJO															#DIV/0!
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp158,240,000.00					Rp147,820,468.00					93.42 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**Rp2,500,000.00**					**Rp2,470,000.00**					**98.80 %**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Rp2,500,000.00					Rp2,470,000.00					98.80 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Rp43,744,000.00**					**Rp41,648,510.00**					**95.21 %**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Rp5,000,000.00					Rp3,904,500.00					78.09 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp3,000,000.00					Rp2,385,800.00					79.53 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp21,620,000.00					Rp21,497,360.00					99.43 %
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Rp4,124,000.00					Rp3,980,500.00					96.52 %
Penyediaan Bahan/Material					Rp10,000,000.00					Rp9,880,350.00					98.80 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Rp10,000,000.00**					**Rp9,797,060.00**					**97.97 %**
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Rp10,000,000.00					Rp9,797,060.00					97.97 %

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Rp81,000,000.00**					**Rp76,508,148.00**					**94.45 %**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp20,000,000.00					Rp16,130,848.00					80.65 %
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp5,000,000.00					Rp4,377,300.00					87.55 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					**Rp56,000,000.00**					**Rp56,000,000.00**					**100.00%**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Rp20,996,000.00**					**Rp17,396,750.00**					**82.86 %**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp11,496,000.00					Rp8,697,150.00					75.65 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp3,500,000.00					Rp2,745,000.00					78.43 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp6,000,000.00					Rp5,954,600.00					99.24 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Rp2,384,000.00					Rp1,313,416.00					55.09 %
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					**Rp2,384,000.00**					**Rp1,313,416.00**					**55.09 %**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Rp2,384,000.00					Rp1,313,416.00					55.09 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Rp933,000,000.00					Rp922,300,000.00					98.85 %

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					**Rp933,000,000.00**					**Rp922,300,000.00**					**98.85 %**
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Rp233,495,000.00					Rp233,495,000.00					100.00%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Rp699,505,000.00					Rp688,805,000.00					98.47 %

Sumber: Data Capaian dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 2020-2024.

Penyerapan anggaran Kecamatan Pacitan secara umum berada pada rentang 80-100%. Adapun penyerapan anggaran di bawah 70% pada subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan disebabkan oleh kendaraan yang rusak berat, sehingga diputuskan untuk dilakukan pemeliharaan atau dihapus dari daftar aset. Kecamatan Pacitan melaksanakan prinsip belanja sesuai kebutuhan, yang mana apabila biaya riil yang dikeluarkan ternyata lebih rendah daripada rencana anggaran, maka belanja yang dikeluarkan mengikuti biaya riil tersebut.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020–2024, Kecamatan Pacitan berhasil menjaga tingkat realisasi anggaran yang tinggi, dengan rata-rata di atas 95% pada hampir seluruh program dan kegiatan. Kegiatan seperti pengadaan sarana kantor, pembangunan infrastruktur kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat telah direalisasikan secara optimal, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan seperti Pucangsewu dan Pacitan, yang menunjukkan pengelolaan keuangan yang efisien dan disiplin.

Namun, dari sisi analisis diagnostik, masih terdapat kesenjangan antara realisasi anggaran yang tinggi dengan dampak layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Beberapa kegiatan strategis seperti penyediaan layanan komunikasi, pemeliharaan kendaraan, serta sinergi antarinstansi menunjukkan realisasi yang rendah atau belum maksimal. Hal ini mencerminkan adanya kendala teknis, perencanaan yang kurang presisi, dan lemahnya koordinasi lintas sektor.

Secara keseluruhan, Kecamatan Pacitan telah menunjukkan capaian yang baik dalam aspek pengelolaan anggaran, tetapi perlu memperkuat orientasi terhadap hasil (*outcome*), bukan hanya realisasi fisik atau keuangan. Peningkatan perencanaan berbasis hasil serta kolaborasi antar unit kerja dan antarinstansi menjadi kunci untuk memastikan anggaran benar-benar berdampak pada kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-

masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan. Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan selama periode perencanaan strategis:

Tabel 2.5 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Pacitan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan surat menyurat	Seluruh warga masyarakat
2	Pemerintahan	Pembinaan dan fasilitasi Pemerintahan Desa	Perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa
3	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dukungan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok Masyarakat di Desa dan Kelurahan
4	Sosial, Ketentraman dan Ketertiban	Penanganan laporan Ketertiban umum, Kebencanaan, dan koordinasi keamanan	Masyarakat umum, Tokoh Masyarakat, aparat keamanan

Sumber: Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, 2025 (diolah penyusun)

Tabel diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Pacitan telah mengidentifikasi kelompok sasaran layanan berdasarkan empat bidang utama, yaitu Pelayanan Umum, Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Sosial, Ketentraman, dan Ketertiban. Setiap bidang memiliki jenis layanan dan penerima manfaat yang spesifik, mulai dari seluruh warga masyarakat, perangkat desa, kelompok masyarakat di desa dan kelurahan, hingga tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Hal ini menunjukkan

pendekatan yang inklusif dan berbasis kebutuhan dalam penyelenggaraan layanan publik.

Pengelompokan sasaran ini memungkinkan Kecamatan Pacitan untuk menyusun strategi pelayanan yang lebih terarah, dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok. Layanan administratif, pemberdayaan, dan sosial dapat disesuaikan agar lebih tepat guna dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini mempermudah perumusan kebijakan dan program yang lebih relevan serta berdampak langsung terhadap masyarakat.

Secara keseluruhan, penetapan kelompok sasaran yang rinci memperlihatkan bahwa Kecamatan Pacitan telah menerapkan perencanaan pelayanan publik yang responsif. Upaya ini mendorong peningkatan efektivitas program serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Dengan strategi ini, pelayanan publik tidak hanya lebih terarah tetapi juga berpotensi memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Kecamatan Pacitan:

Tabel 2.6 Mitra Kecamatan Pacitan

No	Mitra Kecamatan Pacitan	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)

No	Mitra Kecamatan Pacitan	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
1	Puskesmas Pacitan	Menyediakan Pelayanan Cek Kesehatan Gratis, Sosialisasi dan Penanganan Penyakit, Koordinasi Lintas Sektor	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam penerapan Kesehatan Lingkungan
2	Puskesmas Tanjungsari	Menyediakan Pelayanan Cek Kesehatan Gratis, Sosialisasi dan Penanganan Penyakit, Koordinasi Lintas Sektor	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam penerapan Kesehatan Lingkungan
3	KUA Kecamatan Pacitan	Koordinasi Keagamaan, Pernikahan, dan Safari Ramadhan	Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan dini dan Bekerjasama dalam hal Keagamaan
4	UPT KBPP	Menyediakan Pelayanan Keluarga Berencana dan Koordinasi Mini Lokakarya Lintas Sektor dan Kader IMP	Meningkatkan pemahaman terkait Keluarga Berencanadi wilayah Kecamatan Pacitan
5	Korwil Dinas Pendidikan	upaya mendukung dan memperkuat penyelenggaraan pendidikan di wilayah kecamatan	Koordinasi dan Pembinaan Sekolah, pendampingan Program pendidikan, dan Penyediaan data dan Informasi
6	Polsek Pacitan	mendukung keamanan, ketertiban, dan pelayanan publik secara terpadu di tingkat kecamatan	Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Sosialisasi Penyuluhan Hukum, dan Pengawasan/Pengamanan Kegiatan Pemerintah Kecamatan
7	Koramil Pacitan	mendukung stabilitas wilayah, ketahanan nasional, dan pembinaan masyarakat di tingkat kecamatan	Pembinaan Ketahanan Wilayah dan Wawasan Kebangsaan, dukungan pengamanan dan Ketertiban, dan pendampingan kegiatan pembangunan Desa (TMMD & Karya Bakti)
8	Badan Kerjasama Antar Desa	mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan	Koordinaasi Program Pembangunan Antar Desa, Pengelolaan Bersama Infrastuktur Antar Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Lembaga Desa, dan Pelaporan dan Monitoring Program Bersama
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	Layanan administrasi kependudukan (perekaman e-KTP, KK, akta kelahiran), layanan	Mempermudah akses dokumen kependudukan masyarakat dan meningkatkan akurasi data penduduk

No	Mitra Kecamatan Pacitan	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
		keliling dokumen kependudukan	
10	Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)	Sosialisasi pelatihan kerja, informasi lowongan kerja, fasilitasi pemagangan dan sertifikasi kompetensi	Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal di wilayah Kecamatan Pacitan
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	Pendampingan program pemberdayaan masyarakat, pelatihan aparatur desa, fasilitasi penguatan BUMDes	Meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dan mendorong kemandirian ekonomi desa

Sumber: Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, 2025 (diolah penyusun)

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Kecamatan Pacitan. Kolaborasi yang terjalin antara Kecamatan Pacitan dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antara elemen-elemen pemerintahan daerah sangat penting, termasuk kerja sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai entitas yang dimiliki pemerintah daerah, BUMD memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah meliputi kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. BUMD juga dapat berfungsi sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas. Berikut adalah dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan:

Tabel 2.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Kecamatan Pacitan

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan	Dukungan terhadap kinerja
1.	PDAM	Pengawasan kualitas Air Minum	Meningkatkan kualitas air minum

Sumber: Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, 2025

Tabel di atas mengilustrasikan kontribusi BUMD dalam mendukung kinerja Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan secara lebih spesifik. Kontribusi yang diberikan oleh BUMD tidak hanya berupa penyediaan sumber daya atau dukungan finansial, tetapi juga dalam bentuk kemitraan yang strategis untuk mewujudkan keberhasilan program-program daerah. Melalui kerjasama yang efektif dengan BUMD, Kecamatan Pacitan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan, mempercepat pencapaian target-target kinerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kecamatan Pacitan memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi setiap kerja sama yang dilakukan, baik antardaerah maupun dengan

pihak ketiga. Kerja sama ini harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Hingga tahun 2025, kerja sama yang dilakukan antara Kecamatan Pacitan dengan pihak ketiga bukan berupa kerja sama legal formal. Kerja sama tersebut di antaranya dilaksanakan dengan perguruan tinggi untuk kegiatan KKN dan penelitian, serta kerja sama dengan pihak swasta untuk sosialisasi produk dan pengetahuan kepada masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Subbab ini menjelaskan permasalahan yang dihadapi perangkat daerah dan isu strategis yang perlu dipertimbangkan perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan dipetakan dalam masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Sedangkan isu strategis dipetakan dari telaah isu strategis global, nasional, regional, serta isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pacitan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan memiliki beragam tantangan yang dapat memengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pacitan dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pacitan

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan belum berjalan secara optimal	Pengelolaan administrasi dan keuangan desa/kelurahan belum efisien dan akuntabel	• Kualitas dan kapasitas aparatur desa otonomi/kelurahan masih terbatas • Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan • Pengawasan APIP belum optimal
2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih rendah	Kurangnya partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan	• Rendahnya literasi masyarakat terkait peran dalam perencanaan • Adanya pesimisme bahwa aspirasi tidak diakomodasi • Kurangnya inisiatif dari pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan • Minimnya keterlibatan warga dalam forum Musrenbang desa dan kecamatan
3	Koordinasi dan keselarasan program kesejahteraan sosial belum terpadu	Sistem pendataan dan pengelolaan informasi kesejahteraan sosial belum terstruktur dan mutakhir	• Keterbatasan SDM di tingkat kecamatan dan desa dalam hal teknis pendataan • Ketiadaan perangkat dan infrastruktur penunjang

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
4	Gangguan Ketentraman ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	Rendahnya kesadaran hukum	• Aktivitas pedagang yang melampaui batas area pasar resmi • Sarana parkir yang belum memadai • Kesadaran masyarakat terhadap ketertiban masih rendah • Penyebaran HIV dan AIDS di kalangan anak muda • Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah • Pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R (*Reduce, reuse, recycle*)
5	Akses layanan publik belum merata	Prosedur administrasi belum optimal	• SDM pelayanan belum berorientasi pada etika kerja dan kepuasan publik
6	Infrastruktur dasar di wilayah kecamatan masih kurang memadai	Jalan desa rusak, drainase buruk dan fasilitas kantor banyak yang belum layak	• Minimnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan renovasi infrastruktur • Kondisi geografis menyulitkan pembangunan infrastruktur • Air meluap saat hujan deras
7	Ketahanan air bersih	Kekeringan musiman dan banyaknya rumah tanpa sanitasi layak	• Ketergantungan terhadap air hujan atau sumber terbatas • Program air bersih belum menjangkau semua wilayah

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
8	Penyerapan anggaran dan pengawasan kegiatan belum akuntabel	Adanya kegiatan tidak sesuai realisasi dan belum terpantau secara efektif	• Pengawasan internal belum kuat • Perencanaan kegiatan tidak berbasis kebutuhan riil • Minimnya akuntabilitas dalam pelaporan kegiatan

Sumber: Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, 2025

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Pacitan. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dampak isu strategis dapat memengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Kecamatan Pacitan didasarkan pada potensi dan permasalahan, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra perangkat daerah Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi,

kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Kecamatan Pacitan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sampah Padat Perkotaan
2. Kelangkaan Air dan Bencana Kekeringan

2.2.2.1.1 Pengelolaan Sampah Padat Perkotaan

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin besar pendapatan domestik bruto (PDB) yang dihasilkan. Analisis dari Global Waste Management Outlook 2024 menunjukkan bahwa seiring dengan tumbuhnya PDB, maka semakin besar pula sampah padat perkotaan (*municipal solid waste*/MSW) yang dihasilkan. Sampah padat perkotaan terdiri dari (1) sampah makanan dan perkebunan; (2) kaca; (3) kertas dan kardus; (4) plastik; (5) logam; dan (6) lain-lain, termasuk tekstil, kayu, kulit, serta sampah rumah tangga dan produk higiene pribadi.

Berdasarkan Global Waste Management Outlook 2024, wilayah Asia Timur dan Tenggara menghasilkan total sampat padat perkotaan sekitar 550 juta ton dengan sampah padat perkotaan per kapita sekitar 0,7 kg/orang/hari. Jika dilihat dari terkelola atau tidaknya sampah padat perkotaan di wilayah Asia Timur dan Tenggara pada tahun 2020, maka terdapat sekitar 200 juta ton yang tidak terkelola, sedangkan yang terkelola sekitar 100 juta ton. Apabila tidak ada aksi yang dilakukan terhadap pengelolaan sampah padat perkotaan ini, wilayah Asia Timur dan Tenggara diproyeksikan pada tahun 2050 akan mempunyai sekitar 400 juta ton sampah padat perkotaan yang tidak terkelola dan 700 juta ton sampah padat yang terkelola. Adapun pengertian sampah padat perkotaan terkelola adalah sampah yang dikumpulkan, kemudian didaur ulang atau dibuang pada fasilitas

yang terkendali. Sedangkan pengertian sampah padat perkotaan yang tidak terkelola ada dua, yaitu (1) tidak dikumpulkan, sehingga dibuang dan dibakar secara terbuka pada oleh penghasil sampah, baik rumah tangga, perusahaan, atau organisasi lainnya; dan (2) dikumpulkan kemudian dibuang dan dibakar di tempat akhir.

Dilihat dari komposisi sampah pada wilayah Asia Timur dan Tenggara, terdapat sekitar 60% sampah makanan dan perkebunan, 15% sampah logam, dan 15% sampah plastik. Kemudian jika dilihat dari jenis pengelolaannya, 35% sampah padat perkotaan masih tidak terkelola, 30% dikelola melalui fasilitas pengubah sampah menjadi energi (*waste-to-energy*), 25% dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir, dan sisanya didaur ulang. Kondisi pengelolaan sampah ini perlu menjadi perhatian dalam kebijakan publik dan pembangunan daerah, agar lingkungan tempat tinggal dapat dihuni dengan aman dan nyaman serta memiliki keberlangsungan di masa depan. Pengelolaan sampah juga melibatkan tidak hanya dari unsur pemerintah, namun juga unsur-unsur lain seperti produsen, retailer, sektor pengelolaan sampah, serta konsumen. Berikut hierarki pengelolaan sampah serta aktornya dalam mengendalikan dan mengelola produksi sampah padat perkotaan:

Tabel 2.9 Hierarki Pengelolaan Sampah serta Aktornya dalam Mengendalikan dan Mengelola Produksi Sampah Padat Perkotaan

		Pemerintah	Produsen	Retailer	Sektor Pengelolaan Sampah	Konsumen
HULU	Mencegah	√	√			√
	Mengurangi	√	√	√		√
	Menggunakan kembali	√	√	√		√
HILIR	Mendaur ulang	√	√		√	√
	Memulihkan energi, panas, dan pengendalian emisi	√			√	√

		Pemerintah	Produsen	Retailer	Sektor Pengelolaan Sampah	Konsumen
	Membuang	√			√	√

Sumber: Global Waste Management Outlook 2024

Kecamatan Pacitan telah melakukan upaya pengelolaan sampah untuk memelihara pelestarian lingkungan. Pengelolaan sampah tersebut berupa kegiatan pengumpulan sampah pada bank sampah, pemilahan sampah, penjualan sampah anorganik, dll. Namun hingga tahun 2025, pengelolaan sampah ini masih dijalankan oleh sebagian kelurahan. Untuk mewujudkan pelestarian lingkungan Kecamatan Pacitan melalui penanganan sampah berkelanjutan, maka dibutuhkan partisipasi dari seluruh sektor dan lapisan masyarakat, khususnya warga dan pelaku aktivitas di Kecamatan Pacitan.

2.2.2.1.2 Kelangkaan Air dan Bencana Kekeringan

Berdasarkan Progress Report on Level of Water Stress 2024 yang dirilis oleh UN Water, tingkat kelangkaan air telah meningkat 2,8% secara global sejak tahun 2015, mencapai 18,6% pada tahun 2021. Terdapat beberapa wilayah yang menunjukkan kondisi signifikan, yaitu Asia Selatan dan Tengah, Afrika Utara, dan Asia Barat yang mengalami kelangkaan air tingkat tinggi. Banyak wilayah mengalami peningkatan kelangkaan air pada beberapa tahun terakhir, di mana Asia Barat dan Afrika Utara menunjukkan peningkatan sebesar 12% sejak tahun 2025, menyorot tantangan yang diperparah oleh perubahan iklim. Sebaliknya, penurunan kelangkaan air pada subwilayah ditunjukkan oleh Eropa, Asia Tengah, dan Asia Timur.

Secara global, agrikultur menjadi pengguna utama sumber daya air, ditunjukkan dengan 72% penarikan total air tawar, diikuti oleh sektor industri (15%), dan sektor jasa (13%). Kurang lebih 10% populasi dunia tinggal di negara-negara dengan tingkat kelangkaan air

yang tinggi dan kritis. Pada tahun 2021, lebih dari 791 juta jiwa terdampak kelangkaan air, meningkat dari 721 juta jiwa pada tahun 2015.

Perempuan terdampak kelangkaan air secara tidak proporsional karena peran yang diemban dan keterbatasan akses sumber daya. Memecahkan masalah kelangkaan air memerlukan integrasi perspektif gender dalam kebijakan pengelolaan air untuk memastikan akses yang adil dan kendali terhadap sumber daya air. Kelangkaan air tinggi juga menghambat sistem pertanian pangan, membatasi irigasi dan produktivitas agrikultur, yang mana merupakan ancaman terhadap ketahanan pangan. Pada tahun 2020, 900 juta orang menghadapi kerawanan pangan, dengan kelangkaan air yang memperparah situasi di wilayah yang mengandalkan pertanian. Jika sistem pertanian pangan tetap tidak berubah, maka masa depan terprediksi akan terjadi kerawanan pangan terus-menerus, degradasi sumber daya alam termasuk air, dan pertumbuhan ekonomi yang terhambat (FAO, 2022).

Selain aktivitas agrikultur, kelangkaan air juga dapat disebabkan oleh perubahan iklim. Berdasarkan Perjanjian Paris, negara-negara sepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca global secara substansial agar peningkatan suhu permukaan rata-rata global jangka panjang dapat dipertahankan jauh di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri dan berupaya membatasinya hingga 1,5°C. Kenaikan suhu sebesar 1,5°C selama sebulan atau setahun merupakan tanda-tanda awal semakin dekatnya pelampauan batas suhu permukaan untuk jangka panjang. Sedangkan suhu rata-rata global untuk periode 10 tahun terakhir, dari 2014 hingga 2023, diperkirakan menjadi periode 10 tahun terhangat yang pernah tercatat, yaitu sekitar 1,2°C di atas rata-rata tahun 1850-190 (un.org).

Setiap penambahan derajat pemanasan global memiliki pengaruh. Dengan setiap peningkatan pemanasan global, perubahan ekstrem dan risiko menjadi lebih besar. Misalnya, setiap tambahan 0,1°C pemanasan global menyebabkan peningkatan intensitas dan frekuensi suhu dan curah hujan ekstrem, serta kekeringan pertanian dan ekologi di beberapa wilayah. Membatasi pemanasan global di bawah 1,5°C akan secara signifikan mengurangi risiko, dampak buruk, serta kerugian dan kerusakan terkait perubahan iklim. Kegagalan untuk melakukannya akan menyebabkan peristiwa cuaca ekstrem yang semakin sering dan berbahaya, termasuk gelombang panas, kekeringan, kebakaran hutan, serta curah hujan lebat dan banjir. Panas ekstrem menyebabkan kematian tertinggi dari semua cuaca ekstrem, dengan perkiraan 489.000 kematian terkait panas per tahun antara tahun 2000 hingga 2019. Suhu permukaan lebih dari 1,5°C juga dapat memicu beberapa titik kritis iklim—seperti kerusakan sistem sirkulasi laut utama, pencairan permafrost boreal secara tiba-tiba, dan runtuhnya sistem terumbu karang tropis—dengan dampak yang tiba-tiba, tak terelakkan, dan berbahaya bagi seluruh manusia.

Bahkan pada tingkat pemanasan global saat ini, sudah terdapat dampak iklim yang dahsyat, termasuk meningkatnya intensitas peristiwa cuaca ekstrem, berkurangnya lapisan es, es laut, dan gletser secara mengkhawatirkan, serta beberapa peristiwa pemutihan karang massal, yang mengakibatkan kerugian yang meluas bagi manusia, ekonomi, dan alam. Pada tahun 2022, bencana memicu rekor 32,6 juta pengungsian internal, yang 98% di antaranya disebabkan oleh bahaya terkait cuaca seperti banjir, badai, kebakaran hutan, dan kekeringan (UNHCR).

Kecamatan Pacitan dan Kabupaten Pacitan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sering terdampak bencana kekeringan,

terutama saat musim kemarau. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan pengelolaan aktivitas penduduk secara berkelanjutan, khususnya tentang pengelolaan air terintegrasi dan peningkatan kesadaran publik akan pemeliharaan sumber daya air.

2.2.2.2 Telaah Isu Nasional

Berdasarkan RPJMN 2025-2024, Indonesia memiliki beberapa batasan pembangunan yang memerlukan strategi kebijakan secara khusus. Batasan-batasan pembangunan nasional yang relevan dengan kondisi Kabupaten Pacitan adalah (1) Luas Permukiman di Area Pesisir Terdampak Perubahan Iklim; (2) Kawasan Rawan Bencana; dan (3) Ketersediaan Air. Selain itu, terdapat dua tantangan pembangunan RPJMN 2025-2029 yang relevan dengan kondisi Kabupate Pacitan, antara lain Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat dan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah.

2.2.2.2.1 Luas Permukiman di Area Pesisir Terdampak Perubahan Iklim

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 311 kabupaten/kota, 1.643 kecamatan, dan 6.367 desa/kelurahan di wilayah pesisir Indonesia yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Wilayah ini berpotensi besar mengalami pcrpindahan penduduk, khususnya akibat abrasi dan bencana hidrometeorologi seperti banjir pesisir atau rob. Dalam kurun waktu 5-l0 tahun terakhir, sekitar 234 kabupaten/kota, 796 kecamatan, dan 1.888 desa/kelurahan atau sekitar 3O persen dari total desa pesisir di Indonesia telah menunjukkan potensi perpindahan pcnduduk. Daerah ini mencakup 150 desa di kawasan metropolitan serta 92 desa di pulau-pulau kecil terluar, yang semakin memperparah risiko sosial-ekonomi.

Pcrubahan iklim diprediksi akan membawa dampak jangka panjang yang signilikan bagi masyarakat pesisir. Data dari climate

central menyebutkan bahwa sekitar 23 juta pcnduduk pesisir di Indonesia diproyeksikan akan menghadapi banjir laut tahunan pada tahun 2050 akibat kenaikan muka air laut. Oleh karena itu, penting untuk memahami profil wilayah pesisir yang rentan agar bisa merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang tepat. Profil ini harus mencakup kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan yang berperan besar dalam menentukan ketahanan masyarakat pesisir.

2.2.2.2.2 Kawasan Rawan Bencana

Kondisi geografis yang terletak di Cincin Api Pasifik menjadikan lndonesia rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Selain itu, perubahan iklim global turut meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Penelitian lain juga mengidentifikasi setidaknya terdapat tiga belas zona *megathrust* di sepanjang pesisir barat dan selatan Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Laut Banda yang berpotensi mengakibatkan bencana gempa dan tsunami. Data ini menjadi bukti penting yang menunjukkan bahwa Indonesia dikelilinsi kawasan yang rawan terhadap bencana.

Hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana tahun 2023 menunjukkan bahwa 13 provinsi di Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi, semcntara 25 provinsi lainnya berada pada tingkat risiko bencana yang sedang. Tidak ada provinsi yang tergolong ke dalam kelas risiko bencana rendah. Provinsi dengan risiko bencana tertinggi adalah Sulawesi Barat, Maluku, dan Kepulauan Bangka Belitung. sementara itu, provinsi dcngan risiko bencana terendah adalah Kepulauan Riau, Papua Pegunungan, dan DKI Jakarta.

Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 168 kabupaten/kota berada dalam klasifikasi risiko bencana tinggi dan 346 kabupaten/kota lainnya memiliki risiko bencana sedang.

Kabupaten Pacitan sendiri termasuk dalam klasifikasi risiko bencana sedang. Pada tahun 2024, Kabupaten Pacitan mengalami bencana alam berupa gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Hal ini menjadi perhatian bagi Kecamatan Pacitan yang pada tahun 2024 juga mengalami bencana gempa bumi dan longsor akibat hujan deras dalam waktu lama. Penanganan yang dibutuhkan di tingkat kecamatan utamanya berkaitan dengan mitigasi bencana.

2.2.2.2.3 Ketersediaan Air

Indonesia memiliki potensi besar datam sumber daya air untuk mendukung berbagai sektor kchidupan, terutama di tengah pertumbuhan populasi dan peningkatan aktivitas ekonomi. Ketersediaan air yang memadai sangat penting untuk menjamin pasokan air bersih, mendukung sektor pertanian, serta menopang berbagai industri yang menjadi pilar pembangunan. Potensi sumber daya air lndonesia tersebar di beberapa wilayah, dengan total air permukaan sebesar 2.783,3 miliar m^3 per tahun dan potensi air tanah dari cekungan air tanah sebesar 20.903,3 miliar m^3 per tahun. Namun demikian, potensi sumber daya air ini tidak diimbangi dengan penyebarannya.

Penyebaran potensi air di Indonesia belum merata baik secara musim maupun geografis. Wilayah padat penduduk seperti Pulau Jawa, yang menampung 56,1 persen populasi nasional, hanya memiliki 6,3 persen dari total ketersediaan air permukaan. Sebaliknya, wilayah-wilayah dengan sumber daya air melimpah seperti Papua (27,6 persen), Kalimantan (28,5 persen), dan Sumatera (26,1 persen) menampung populasi yang jauh lebih kecil. Ketidakseimbangan distribusi air ini menimbulkan kelangkaan (water stress) yang lebih besar di daerah-daerah dengan permintaan air tinggi.

Di sisi lain, kebcradaan hutan yang berfungsi sebagai pengatur tata air alami tertekan akibat tingginya pcrtumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan. saat ini, 12,7 juta hektare lahan kritis sudah tidak berfungsi sebagai media pengatur tata air. Di sisi lain, jumlah hari hujan cenderung menurun, sementara intensitas hujan lebih lebat dan ekstrem. Perubahan ini meningkatkan risiko banjir di daerah hilir saat kejadian hujan ekstrem serta memperpanjang periode kekeringan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung ketersediaan air dalam memenuhi permintaan air di masa mendatang.

Selain batasan pembangunan, dalam RPJMN 2025-2029 juga dibahas tentang peluang dan tantangan pembangunan. Berikut peluang dan tantangan pembangunan yang relevan dengan kondisi Kabupaten Pacitan:

2.2.2.2.4 Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angla ini mcncapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bcrtambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian

Ketenagakeriaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponcn harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

2.2.2.2.5 Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/Corruption Perception Index lndonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari I80 negara). Adapun pada

indikator Indeks Perilalu Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

2.2.2.3 Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini memberikan dasar bagi kebijakan dan program pembangunan daerah, agar selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Oleh karena itu, isu-isu dalam KLHS RPJMD perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Isu-isu ini merupakan hasil identifikasi berbagai permasalahan pembangunan berkelanjutan, yang telah melalui proses penjaringan, pengelompokan, serta pembobotan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2016. Dalam konteks kecamatan di Kabupaten Pacitan, isu pelayanan publik yang strategis mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan.

2.2.2.3.1 Pemerataan Akses dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Isu ini sangat relevan untuk kecamatan karena pemerataan pelayanan kesehatan menjadi kunci dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil. Masih terdapat kecamatan dengan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata serta rendahnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kecamatan seperti Nawangan dan Bandar memiliki keterbatasan dalam akses terhadap fasilitas dan tenaga medis. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan kesehatan perlu difokuskan hingga level kecamatan.

Latar Belakang: Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Namun dalam konteks Kabupaten Pacitan, kesenjangan geografis berupa wilayah perbukitan dan pesisir menyebabkan tidak meratanya distribusi layanan kesehatan dasar. Ketimpangan ini menyebabkan masyarakat di wilayah tertentu menghadapi hambatan untuk mengakses layanan persalinan, imunisasi, penanganan penyakit menular dan tidak menular, serta layanan kesehatan jiwa.

Data menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas kesehatan masih terpusat di kawasan perkotaan atau ibukota kecamatan, sedangkan desa-desa di daerah pinggiran belum dilengkapi dengan Puskesmas pembantu atau Poskesdes yang memadai. Selain itu, rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk juga masih jauh dari standar ideal.

Urgensi: Ketimpangan akses ini berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan bayi, meningkatnya kasus bunuh diri, serta rendahnya cakupan jaminan kesehatan. Bila dibiarkan, hal ini akan memperparah ketimpangan kualitas hidup dan memperbesar beban kesehatan publik. Dalam konteks jangka panjang, lemahnya sistem

kesehatan lokal juga akan menurunkan produktivitas masyarakat dan memperberat beban fiskal pemerintah.

Relevansi Data:

- TPB 3.1.2: Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih belum merata.
- TPB 3.2.1 & 3.2.2: Angka kematian balita dan neonatal tinggi.
- TPB 3.4.2: Angka kasus bunuh diri meningkat, menandakan kebutuhan layanan kesehatan mental.
- TPB 3.8.2(a): Cakupan jaminan kesehatan belum universal.
- TPB 3.c.1: Rasio tenaga medis per penduduk rendah.

Sumber Lain: Masukan publik dari FKP mendorong peningkatan layanan kesehatan keliling dan penyediaan ambulans desa. RPJPD Provinsi dan Kabupaten menekankan pentingnya pembangunan SDM berkualitas, dimulai dari layanan kesehatan dasar yang adil dan merata.

Kesimpulan: Pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan harus menjadi prioritas dalam RPJMD. Pemerintah daerah perlu menyusun strategi lintas sektor yang mencakup penyediaan dan pemerataan fasilitas, insentif tenaga kesehatan, pengembangan layanan bergerak (mobile health), integrasi kesehatan jiwa dalam layanan dasar, serta digitalisasi sistem layanan kesehatan (telemedicine, rekam medis elektronik). Strategi ini akan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap krisis kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

2.2.2.3.2 Optimalisasi Partisipasi Sekolah dan Pemenuhan Fasilitas Pendidikan

Sebagian wilayah kecamatan di Kabupaten Pacitan masih memiliki angka partisipasi sekolah dan infrastruktur pendidikan yang belum optimal. Isu ini penting untuk menghindari disparitas

pendidikan antar wilayah serta meningkatkan kualitas SDM di tingkat lokal.

Latar Belakang: Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Pacitan, meskipun sudah terdapat kemajuan dalam akses pendidikan dasar, namun masih terdapat kesenjangan dalam hal partisipasi dan kualitas pendidikan, khususnya di daerah terpencil dan pedesaan. Banyak sekolah menghadapi keterbatasan infrastruktur, kekurangan guru yang kompeten, serta terbatasnya akses terhadap teknologi pendidikan.

Kondisi geografis Pacitan yang terdiri dari perbukitan dan wilayah pesisir juga menyebabkan tantangan distribusi fasilitas pendidikan. Selain itu, kurangnya motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak-anak ke jenjang lebih tinggi masih menjadi permasalahan sosial yang belum terselesaikan.

Urgensi: Jika tidak segera ditangani, rendahnya partisipasi sekolah dan buruknya fasilitas pendidikan akan memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja, ketimpangan pendapatan, dan lambatnya inovasi daerah. Pendidikan adalah jembatan utama untuk mobilitas sosial vertikal dan pengentasan kemiskinan.

Relevansi Data:

- TPB 4.1.1(d & e): Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP masih di bawah target nasional.
- TPB 4.6.1(a): Tingkat melek aksara masih menunjukkan disparitas antara wilayah dan kelompok usia.
- TPB 4.a.1: Proporsi sekolah yang memiliki fasilitas dasar (air, sanitasi, listrik, internet) masih rendah.

Sumber Lain:

- Kondisi Umum Daerah: IPM Pacitan masih berada di bawah rata-rata Jawa Timur, dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) < 8 tahun.
- Masukan FKP: Menuntut peningkatan fasilitas pendidikan, pelatihan guru, dan dukungan terhadap pendidikan vokasi.
- KLHS RPJPD Kabupaten: SDM yang rendah menjadi faktor pembatas utama terhadap inovasi dan daya saing daerah.

Kesimpulan: RPJMD perlu memberikan perhatian khusus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui revitalisasi fasilitas sekolah, pembangunan sekolah baru di wilayah yang underserved, pelatihan dan insentif guru, serta digitalisasi pembelajaran. Selain itu, penting untuk mengembangkan sistem pendidikan vokasi dan alternatif yang sesuai dengan potensi lokal guna menjembatani kesenjangan dunia pendidikan dan dunia kerja.

2.2.2.3.3 Kemiskinan dan Pemenuhan Hak Dasar Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan yang tinggi di beberapa kecamatan menandakan perlunya pendekatan pelayanan publik yang inklusif. Pelayanan sosial dasar seperti akses listrik, air minum, dan jaminan sosial menjadi elemen penting yang perlu diprioritaskan di tingkat kecamatan.

Latar Belakang: Kemiskinan masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Pacitan. Meskipun angka kemiskinan secara agregat menunjukkan tren penurunan, namun karakteristik kemiskinan di Pacitan bersifat struktural dan multidimensional. Penduduk miskin tidak hanya menghadapi persoalan pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, dan energi. Sebagian besar keluarga miskin tinggal di

wilayah-wilayah dengan akses geografis terbatas dan minim fasilitas publik.

Kemiskinan juga bersinggungan dengan ketimpangan wilayah dan kesenjangan sosial, di mana terjadi konsentrasi pembangunan di wilayah tertentu sementara daerah lainnya tertinggal. Oleh karena itu, persoalan kemiskinan di Pacitan perlu ditangani tidak hanya dengan pendekatan karitatif atau jangka pendek, tetapi melalui transformasi struktural yang menjamin keadilan sosial dan ekonomi.

Urgensi: Jika dibiarkan, kemiskinan dapat menjadi sumber ketimpangan dan penghambat pertumbuhan daerah secara menyeluruh. Masyarakat miskin juga lebih rentan terhadap risiko bencana, penyakit, dan gejolak ekonomi, sehingga ketahanan sosial daerah menjadi lemah. Penanggulangan kemiskinan merupakan kunci untuk membuka akses terhadap hak-hak dasar dan memberdayakan masyarakat dari bawah.

Relevansi Data:

- TPB 1.2.1: Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional di Pacitan masih di atas 13%, melampaui rata-rata nasional (<8%).
- TPB 1.3.1 (a, b, c): Cakupan kepesertaan dalam program jaminan sosial dan kesehatan masih rendah.
- TPB 1.4.1 (d, e, k): Masih terdapat rumah tangga miskin yang belum memiliki akses terhadap air layak, sanitasi layak, dan listrik.

Sumber Lain:

- Kondisi Umum Daerah: Ketimpangan spasial yang tinggi antara desa dan kota, serta terbatasnya anggaran afirmatif.
- Masukan FKP: Kebutuhan akan peningkatan program pemberdayaan masyarakat dan subsidi layanan dasar.

- RPJPD Provinsi dan Kabupaten: Menekankan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penguatan program integratif.

Kesimpulan: Isu kemiskinan harus dijawab dengan strategi intervensi multi-sektor yang komprehensif dan berkelanjutan. RPJMD Kabupaten Pacitan harus menjamin pemenuhan hak dasar melalui program akses layanan dasar gratis atau bersubsidi, penguatan basis data kemiskinan terintegrasi, peningkatan pelatihan dan kewirausahaan produktif, serta pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas. Sinergi lintas OPD serta pelibatan dunia usaha dan masyarakat sipil sangat penting dalam menciptakan ekosistem pengentasan kemiskinan yang inklusif.

2.2.2.3.4 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Kualitas pelayanan publik di kecamatan sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Rendahnya pemanfaatan e-procurement serta belum optimalnya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat kecamatan menjadi tantangan yang harus diatasi melalui reformasi tata kelola publik yang lebih akuntabel dan responsif.

Latar Belakang: Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Pacitan masih sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah yang dominan berbasis sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan). Ketergantungan terhadap sektor informal, rendahnya nilai tambah produksi, dan keterbatasan akses ke modal serta pasar menjadi kendala utama dalam mengangkat taraf hidup masyarakat.

Tingkat pengangguran terbuka memang rendah, namun sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal dengan produktivitas rendah dan tanpa perlindungan sosial. Potensi ekonomi lokal seperti hasil pertanian, kerajinan rakyat, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) belum dimanfaatkan secara optimal.

Urgensi: Ketika sektor ekonomi masyarakat lemah, maka ketahanan sosial dan daya saing daerah akan menurun. Kesejahteraan ekonomi bukan hanya urusan pendapatan, tetapi juga berkaitan erat dengan kemandirian, keberdayaan, dan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan.

Relevansi Data:

- TPB 8.1.1: Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Pacitan menunjukkan perlambatan.
- TPB 8.3.1: Rendahnya proporsi tenaga kerja di sektor formal dan produktif.
- TPB 8.10.1: Keterjangkauan dan ketersediaan lembaga keuangan belum merata, terutama di desa terpencil.

Sumber Lain:

- Kondisi Umum Daerah: Masih rendahnya investasi lokal dan daya beli masyarakat.
- RPJPD Provinsi dan Kabupaten: Menekankan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi berbasis potensi lokal.
- Masukan FKP: Masyarakat membutuhkan akses pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran hasil usaha mikro.

Kesimpulan: RPJMD perlu mengarahkan program pembangunan ekonomi rakyat yang berbasis potensi lokal, seperti pengembangan pertanian organik, perikanan tangkap dan budidaya, produk kreatif, serta pariwisata berbasis komunitas. Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan dalam bentuk kemudahan akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, penguatan koperasi, serta digitalisasi pemasaran produk lokal. Ekonomi kerakyatan yang kuat akan menciptakan kemandirian desa dan memperkuat kohesi sosial di tingkat akar rumput.

2.2.2.3.5 Peningkatan Infrastruktur Daerah

Banyak kecamatan di Pacitan yang masih memerlukan peningkatan akses jalan, jaringan transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Isu ini sangat strategis karena keterhubungan antar wilayah memengaruhi efektivitas pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Latar Belakang: Infrastruktur memiliki peran penting sebagai pengungkit pembangunan wilayah. Di Kabupaten Pacitan, banyak wilayah belum terhubung secara optimal melalui jaringan jalan utama dan infrastruktur dasar lainnya. Konektivitas antar wilayah, antar kecamatan, dan aksesibilitas ke pusat-pusat ekonomi dan layanan publik masih menjadi tantangan besar.

Pembangunan infrastruktur juga terkait langsung dengan efisiensi logistik, mobilitas penduduk, pengembangan kawasan strategis, dan peningkatan produktivitas ekonomi lokal. Keterbatasan jaringan irigasi, infrastruktur digital, dan sarana transportasi publik turut menghambat percepatan pembangunan daerah.

Urgensi: Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pertumbuhan ekonomi daerah akan stagnan, pelayanan publik tidak optimal, serta ketimpangan wilayah semakin lebar. Infrastruktur merupakan tulang punggung pembangunan lintas sektor, baik untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, maupun UMKM.

Relevansi Data:

- Tidak tersedianya akses jalan mantap yang merata ke seluruh desa.
- Masih banyak wilayah blank spot untuk jaringan komunikasi dan internet.

- Infrastruktur penunjang transportasi publik dan logistik belum terintegrasi.

Sumber Lain:

- RTRW dan RPJPD: Menetapkan pengembangan infrastruktur strategis sebagai bagian dari tata ruang dan arah pembangunan wilayah jangka panjang.
- Masukan FKP: Aspirasi masyarakat terkait perbaikan jalan, jembatan, infrastruktur pengairan, listrik desa, dan perluasan jaringan internet.
- Kondisi Umum Daerah: Keterbatasan fiskal menjadi hambatan pembangunan infrastruktur secara massif, memerlukan skema kemitraan.

Kesimpulan: RPJMD harus mengarahkan penguatan pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Perluasan konektivitas antar wilayah, digitalisasi infrastruktur publik, pemanfaatan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), serta pembangunan berbasis kawasan strategis menjadi langkah penting. Infrastruktur yang kuat dan merata akan membuka isolasi wilayah, menumbuhkan pusat pertumbuhan baru, dan mempercepat transformasi ekonomi daerah.

2.2.2.3.6 Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Ketersediaan Air

Latar Belakang: Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia dan pilar penting dalam mendukung kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, serta keberlanjutan lingkungan. Kabupaten Pacitan menghadapi permasalahan serius terkait pencemaran sungai akibat limbah domestik dan pertanian, rendahnya kualitas air baku, serta keterbatasan layanan penyediaan air bersih, khususnya di wilayah perbukitan dan pelosok desa.

Sebagian masyarakat masih mengandalkan sumber air permukaan atau sumur gali yang kualitasnya tidak terjamin. Selain itu, terdapat tantangan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rusak akibat alih fungsi lahan dan minimnya upaya konservasi hulu. Perubahan iklim juga turut memperparah krisis ketersediaan air di musim kemarau.

Urgensi: Tanpa ketersediaan air yang cukup dan berkualitas, upaya peningkatan derajat kesehatan, produktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat tidak akan optimal. Peningkatan kualitas air dan akses air bersih juga merupakan indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Relevansi Data:

- TPB 6.1.1: Akses terhadap layanan air minum layak dan aman belum menjangkau seluruh penduduk.
- TPB 6.3.2: Kualitas air sungai menurun karena pencemaran domestik dan pertanian.

Sumber Lain:

- Kondisi Umum Daerah: Daya dukung air menurun, ketersediaan air musiman, dan banyak desa mengalami kekeringan saat musim kemarau.
- RTRW dan KLHS: Menggarisbawahi pentingnya perlindungan daerah tangkapan air, rehabilitasi DAS, dan pemanfaatan teknologi pengolahan air bersih.
- Masukan FKP: Permintaan masyarakat atas akses air bersih yang lebih luas dan terjangkau serta pengurangan pencemaran air sungai dari limbah rumah tangga dan pertanian.

Kesimpulan: RPJMD harus mengarusutamakan pengelolaan air terpadu (integrated water resources management) dengan pendekatan konservasi, rehabilitasi, dan penguatan layanan air bersih. Strategi

yang perlu diambil meliputi pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah sulit akses, peningkatan kualitas SPAM desa, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, serta penguatan kelembagaan pengawasan pencemaran air. Ketersediaan air bersih yang adil dan berkelanjutan akan meningkatkan kesehatan publik dan daya dukung ekosistem daerah.

2.2.2.4 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Kabupaten Pacitan Isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Perangkat Daerah agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun isu strategis daerah yang relevan antara lain sebagai berikut:

1. Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas, Unggul, dan Berbudaya;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata dan Sektor Unggulan Daerah;
3. Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat;
4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan.

Berikut penjabaran lebih lanjut terkait telaah RPJMD:

2.2.2.4.1 Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas, Unggul, dan Berbudaya

Pembangunan sumber daya manusia merupakan prioritas strategis dalam RPJMD Kabupaten Pacitan yang diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Isu strategis *Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas, Unggul, dan Berbudaya* menuntut pemerataan akses terhadap layanan dasar hingga tingkat kecamatan dan desa sebagai basis pembangunan manusia. Berdasarkan data BPS dan OPD teknis, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam kualitas dan distribusi layanan pendidikan serta kesehatan antarkecamatan. Hal ini terutama terjadi di wilayah terpencil seperti Kecamatan Nawangan, Bandar, dan Donorojo yang menghadapi hambatan geografis berupa pegunungan dan akses transportasi terbatas.

Permasalahan dan Urgensi

a. Sektor Kesehatan

- Data Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa dari 24 kecamatan, hanya sebagian yang memiliki fasilitas kesehatan memadai, dan sebagian besar tenaga medis masih terpusat di Kecamatan Pacitan.
- Rasio dokter per 100.000 penduduk Kabupaten Pacitan masih di bawah standar ideal WHO (1:1.000).
- Cakupan kepesertaan JKN Kabupaten Pacitan per 2023 hanya sekitar 74,8% dari total penduduk (Sumber: Dinkes Pacitan, 2023).
- Angka Kematian Ibu (AKI) masih tercatat 112 per 100.000 kelahiran hidup pada 2022, di atas target nasional.

b. Sektor Pendidikan

- Berdasarkan *Kabupaten Pacitan Dalam Angka 2024* (BPS, 2024), Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK di beberapa kecamatan masih berada di bawah 70%.
- Masih terdapat kekurangan guru di daerah terpencil, terutama pada jenjang SMP dan SMA.
- Rasio murid terhadap guru di beberapa SD di Kecamatan Tulakan dan Nawangan masih di atas 30:1 (BPS Pacitan, 2024).
- Fasilitas penunjang seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet masih minim di luar wilayah pusat kota.

Kecamatan Pacitan sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi daerah memiliki infrastruktur dan akses layanan dasar yang relatif lebih baik. Konsentrasi Puskesmas, RSUD, sekolah unggulan, dan pusat kebudayaan berada di wilayah ini. Oleh karena itu, Kecamatan Pacitan dapat dijadikan sebagai sentra pengembangan masyarakat unggul yang kemudian ditransformasikan ke kecamatan lainnya melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis wilayah. Namun demikian, fokus pembangunan SDM tidak dapat hanya berpusat di Kecamatan Pacitan. Peningkatan kualitas SDM harus diintegrasikan di seluruh kecamatan melalui kebijkan- kebijakan lintas sektor. Deangan ini isu strategis peningkatan kualitas masyarakat sangat relevan dengan tantangan pembangunan di tingkat kecamatan. Pemerataan layanan dasar menjadi fondasi utama untuk mewujudkan masyarakat Pacitan yang sehat, terdidik, dan berbudaya.

2.2.2.4.2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata dan Sektor Unggulan Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Pacitan, diarahkan pada optimalisasi potensi sektor unggulan seperti

pariwisata, pertanian, dan perikanan. Kecamatan Pacitan sebagai pusat pemerintahan sekaligus sentra pariwisata dan perdagangan, memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi kawasan. Namun demikian, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dasar, ketahanan lingkungan, dan kapasitas produksi masyarakat di sektor-sektor produktif.

Permasalahan dan Urgensi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan yang bertumpu pada sektor pariwisata dan pertanian menghadapi tantangan serius terkait keterbatasan infrastruktur dasar yang menopang keberlanjutan dua sektor unggulan tersebut. Salah satu permasalahan mendasar adalah belum meratanya akses air bersih di berbagai kecamatan, terutama di wilayah perbukitan seperti Tulakan, Tegalombo, dan Punung. Masyarakat di wilayah ini masih mengandalkan air permukaan dan sumur dangkal, yang dari sisi kualitas dan kuantitas belum memenuhi standar layak konsumsi. Data dari BPS (2023) menunjukkan bahwa akses air minum layak di Kabupaten Pacitan baru mencapai 77,5%, sedangkan cakupan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh PDAM belum mampu menjangkau seluruh desa, khususnya di wilayah dengan topografi sulit. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menghambat pengembangan sektor pariwisata dan pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air bersih yang berkelanjutan.

Selain keterbatasan air, kawasan-kawasan wisata unggulan seperti Pringkuku, Donorojo, dan Punung juga berada di zona rawan bencana, termasuk ancaman tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi. Minimnya infrastruktur mitigasi bencana di kawasan-kawasan ini, seperti jalur evakuasi, shelter aman, dan sistem peringatan dini,

menempatkan keselamatan pengunjung dan pelaku usaha dalam risiko tinggi. Laporan Indeks Risiko Bencana Indonesia (BNPB, 2023) menunjukkan bahwa Kabupaten Pacitan tergolong dalam kategori risiko tinggi, sementara hasil pemetaan BPBD Pacitan mencatat banyak destinasi wisata yang belum dilengkapi sarana mitigasi yang memadai. Ketiadaan sistem ketangguhan bencana yang terintegrasi dapat merusak citra destinasi, memicu kerugian ekonomi, dan menghambat investasi di sektor pariwisata.

Di sisi lain, sektor pertanian yang menjadi fondasi ekonomi mayoritas masyarakat Pacitan masih menghadapi tantangan struktural. Kecamatan seperti Nawangan, Arjosari, dan Tulakan menunjukkan ketergantungan tinggi pada sistem pertanian konvensional yang kurang adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar. Rendahnya adopsi teknologi pertanian, alih fungsi lahan, serta keterbatasan infrastruktur irigasi menyebabkan menurunnya produktivitas lahan. Rata-rata hasil panen padi di wilayah ini masih berada di bawah 5 ton/ha (Dinas Pertanian, 2022), dan lebih dari 30% lahan sawah tadah hujan mengalami kerusakan jaringan irigasi (DPUTR, 2023). Kerawanan pangan musiman di sejumlah wilayah pedesaan, sebagaimana tercatat dalam indikator TPB 2.1.1, semakin mempertegas perlunya revitalisasi sistem ketahanan pangan daerah.

Keterkaitan antara ketiga isu ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor pariwisata dan pertanian tidak bisa dilepaskan dari perbaikan infrastruktur dasar, penguatan sistem ketahanan lingkungan, serta peningkatan kapasitas adaptif masyarakat lokal. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, sebagaimana ditetapkan dalam isu strategis RPJMD Kabupaten Pacitan, membutuhkan pendekatan lintas sektor yang menyinergikan

infrastruktur air bersih, mitigasi risiko bencana, dan penguatan produktivitas sektor unggulan. Intervensi yang bersifat holistik akan menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif. Isu strategis penguatan ekonomi daerah melalui pariwisata dan sektor unggulan sangat relevan untuk dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan akses air bersih, penguatan ketahanan pangan, dan mitigasi bencana di tingkat kecamatan.

2.2.2.4.3 Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas strategis dalam dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Pacitan. Isu kesejahteraan tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui pemenuhan hak dasar seperti akses terhadap air bersih, sanitasi layak, listrik, jaminan sosial, layanan pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial. Dalam konteks Kabupaten Pacitan, tantangan utamanya adalah tingginya angka kemiskinan struktural di beberapa kecamatan, disertai ketimpangan spasial dan terbatasnya infrastruktur layanan dasar. Kecamatan Pacitan sebagai pusat administratif, layanan publik, dan perekonomian kabupaten memiliki capaian kesejahteraan yang relatif lebih tinggi dibanding kecamatan lainnya. Namun, disparitas antar wilayah, khususnya antara desa dan kota, masih cukup signifikan, terutama di kecamatan dengan topografi sulit seperti Nawangan, Bandar, dan Pringkuku. Ketimpangan ini harus segera direspons melalui strategi pengurangan kemiskinan yang terintegrasi dan inklusif.

Permasalahan dan Urgensi

a. **Tingginya Angka Kemiskinan Multidimensional**

Meskipun angka kemiskinan Kabupaten Pacitan mengalami tren penurunan, yakni dari 14,25% (2021) menjadi 13,37% (2023), namun angka tersebut masih jauh di atas rata-rata nasional (9,36%) dan provinsi Jawa Timur (10,15%) (Sumber: BPS, *Pacitan Dalam Angka 2023*). Karakteristik kemiskinan di Pacitan bersifat multidimensi, di mana penduduk miskin juga mengalami kekurangan dalam akses layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi.

- TPB 1.2.1: Sebagian besar kecamatan masih memiliki angka penduduk di bawah garis kemiskinan >12%.
- TPB 1.3.1: Cakupan jaminan sosial masih belum menyentuh seluruh populasi rentan.
- TPB 1.4.1**:** Masih terdapat rumah tangga miskin yang tidak memiliki akses terhadap air layak, listrik PLN, dan sanitasi sehat.

b. Ketimpangan Akses Layanan Dasar

Kecamatan Pacitan sebagai pusat pelayanan memiliki fasilitas publik dan infrastruktur yang cukup memadai. Namun banyak kecamatan di luar wilayah perkotaan masih menghadapi keterbatasan akses:

a. Jaringan listrik PLN belum menjangkau seluruh wilayah perbukitan dan pinggiran (Dinas ESDM Jatim, 2023).
b. Cakupan layanan air bersih dari PDAM baru mencapai ± 70% dari target pelayanan (PDAM Pacitan, 2023).
c. Akses sanitasi layak dan limbah rumah tangga yang belum tertangani masih terjadi di lebih dari 1/3 desa di Kabupaten Pacitan (BPS, 2023).

c. Kerentanan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Miskin

Kondisi geografis yang sulit serta keterbatasan infrastruktur membuat masyarakat miskin menjadi lebih rentan terhadap; risiko

kesehatan dan gizi buruk, isolasi ekonomi dan pasar, ketidakmampuan mengakses program bantuan karena keterbatasan informasi dan mobilitas, dampak bencana alam dan perubahan iklim.

Sebagai wilayah administratif pusat, Kecamatan Pacitan memiliki sejumlah keunggulan strategis yang menjadikannya titik sentral pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Ketersediaan layanan sosial dasar yang lengkap, seperti keberadaan RSUD, PDAM, sekolah menengah atas, pasar induk, dan Balai Latihan Kerja (BLK), memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Di samping itu, keberadaan fasilitas publik seperti kantor pelayanan sosial, kantor BPJS, serta akses langsung terhadap berbagai program perlindungan sosial menunjukkan bahwa Kecamatan Pacitan telah mengembangkan infrastruktur kelembagaan yang relatif kuat dan menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Konsentrasi program pelatihan kerja, bantuan bagi pelaku UMKM, serta penguatan pendidikan vokasi turut menjadikan kecamatan ini sebagai lokomotif dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia daerah.

Namun, keberhasilan Kecamatan Pacitan dalam membangun ekosistem pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat seharusnya tidak berhenti di wilayah ini saja, melainkan menjadi role model untuk diterapkan di kecamatan lainnya. Dengan mempertimbangkan tantangan ketimpangan wilayah dan tingginya tingkat kemiskinan di beberapa kecamatan, isu strategis mengenai meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat harus dijawab melalui pendekatan yang menyeluruh dan inklusif. Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat menjadikan Kecamatan Pacitan sebagai simpul pelayanan, penguatan kelembagaan, dan laboratorium inovasi sosial, yang hasil dan pengalamannya dapat diduplikasi secara terarah ke

wilayah lainnya. Pendekatan intervensi multisektor yang mencakup air, listrik, sanitasi, pendidikan, dan perlindungan sosial perlu dilaksanakan secara terintegrasi untuk menghasilkan dampak pembangunan yang lebih merata. Selain itu, pendekatan berbasis kewilayahan dengan mengacu pada data spasial dan kondisi lokal masing-masing kecamatan penting untuk memastikan efektivitas intervensi. Partisipasi komunitas lokal, kemitraan dengan BUMDes, UMKM, dan sektor swasta melalui program CSR juga harus didorong guna memperkuat pelaksanaan program sosial. Penguatan sistem informasi terpadu yang didukung oleh data kemiskinan mikro berbasis desa dan RT menjadi kunci untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan tepat sasaran.

2.2.2.4.4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan partisipatif. Di Kabupaten Pacitan, reformasi tata kelola publik masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di level kecamatan dan desa. Implementasi SPM belum merata, pemanfaatan e-procurement dan e-government masih terbatas, serta kapasitas SDM penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal belum sepenuhnya memadai. Selain itu, sektor ekonomi daerah yang belum terkelola dengan baik akibat lemahnya perencanaan partisipatif dan pemanfaatan data berbasis wilayah, juga memperburuk efektivitas program-program pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan dan Urgensi

Tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan di Kabupaten Pacitan masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang perlu segera diatasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel, efisien, dan responsif. Salah satu kendala utama adalah lemahnya

implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021. Belum seluruh kecamatan mampu menyusun dan melaporkan capaian SPM secara sistematis, yang berdampak pada tidak optimalnya pengukuran kualitas layanan dasar kepada masyarakat. Selain itu, rendahnya akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian, di mana sistem e-Procurement belum sepenuhnya diadopsi di tingkat kecamatan maupun desa, sehingga masih terdapat potensi inefisiensi dan kurangnya transparansi.

Manajemen keuangan dan pelayanan berbasis kinerja juga menunjukkan kelemahan signifikan. Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2023, banyak unit kecamatan di Pacitan yang belum memiliki sistem pelaporan kinerja berbasis outcome. Hal ini menghambat upaya penilaian efektivitas program serta akuntabilitas pemanfaatan anggaran publik. Tantangan lainnya adalah keterbatasan akses dan literasi digital di kalangan aparatur kecamatan, yang berdampak pada lambatnya transformasi layanan publik berbasis elektronik dan menghambat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Namun demikian, Kecamatan Pacitan sebagai wilayah administratif utama memiliki peluang besar untuk menjadi pionir dalam reformasi tata kelola lokal. Kecamatan ini dapat menginisiasi penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pelatihan rutin mengenai tata kelola SPM, perencanaan partisipatif, dan pengelolaan keuangan berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pelaksanaan pilot project e-SPM dan e-Monev yang dikembangkan dalam bentuk dashboard kecamatan juga dapat menjadi model yang direplikasi di kecamatan lainnya. Upaya

digitalisasi pelayanan publik dapat dilakukan melalui pengembangan aplikasi layanan kecamatan, sistem pengaduan daring, serta peningkatan keterbukaan informasi publik. Selain itu, penguatan partisipasi masyarakat melalui Forum Kecamatan yang inklusif juga penting untuk mendorong Musrenbang yang melibatkan kelompok rentan, pelaku UMKM, dan unsur akademisi secara aktif.

Dengan demikian, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan perlu dimulai dari kecamatan sebagai unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pacitan didorong untuk menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja di seluruh kecamatan, mendorong digitalisasi pelayanan, serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pembentukan model Kecamatan Inklusif dan Tanggap Digital akan menjadi langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan partisipatif. Keberhasilan ini tentu memerlukan kolaborasi lintas sektor dalam hal pembinaan, supervisi, dan monitoring kinerja kecamatan secara berbasis data yang komprehensif dan berkelanjutan.

2.2.2.5 Potensi Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu sumber utama dalam perumusan isu strategis. Pemanfaatan potensi daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Oleh karena itu, potensi unggulan daerah perlu diidentifikasi sebagai isu strategis yang dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan. Adapun potensi daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pacitan antara lain:

1. Potensi produk unggulan lokal: produk kuliner UMKM hasil laut, keripik, dll.
2. Potensi sektor pariwisata: pantai dan Museum dan Galeri Seni SBY-Ani.
3. Potensi sumber daya alam: perikanan tangkap.

2.2.2.6 Isu Strategis Kecamatan Pacitan 2025-2029

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis perangkat daerah secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Pacitan dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.10 Perumusan Isu Kecamatan Pacitan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
• Potensi produk unggulan lokal: produk kuliner UMKM hasil laut, keripik, dll. • Potensi sektor pariwisata: pantai dan Museum dan Galeri Seni SBY-Ani. • Potensi sumber daya alam: perikanan tangkap.	Penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan belum berjalan secara optimal	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan
	Penyerapan anggaran dan pengawasan kegiatan belum akuntabel					Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kegiatan
	Gangguan ketentraman ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan		Pengelolaan sampah padat perkotaan			Peningkatan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan
	Akses layanan publik belum merata	Pemerataan Akses dan Pelayanan Kesehatan				Pemerataan akses dan kualitas layanan publik
	Infrastruktur dasar di wilayah kecamatan masih kurang memadai	Peningkatan Infrastruktur Daerah		Luas Permukiman di Area Pesisir Terdampak		Peningkatan infrastruktur dasar berbasis

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
				Perubahan Iklim		mitigasi bencana
				Kawasan Rawan Bencana		
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih rendah				Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas, Unggul, dan Berbudaya	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
	Koordinasi dan keselarasan program kesejahteraan sosial belum terpadu	Kemiskinan dan Pemenuhan Hak Dasar Penduduk Miskin		Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan koordinasi program kesejahteraan sosial terpadu
	Ketahanan air bersih	Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Ketersediaan Air	Kelangkaan Air	Ketersediaan Air		Penguatan ketahanan air bersih dan layanan air minum
		Optimalisasi Partisipasi Sekolah dan Pemenuhan				

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
		Fasilitas Pendidikan				
					Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata dan Sektor Unggulan Daerah	

Sumber: Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, 2025 (diolah penyusun)

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Kecamatan Pacitan. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Kecamatan Pacitan. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Kecamatan Pacitan. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Kecamatan Pacitan disajikan sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan
2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kegiatan
3. Peningkatan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan
4. Pemerataan akses dan kualitas layanan publik
5. Peningkatan infrastruktur dasar berbasis mitigasi bencana
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
7. Penguatan koordinasi program kesejahteraan sosial terpadu
8. Penguatan ketahanan air bersih dan layanan air minum

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut terkait isu strategis Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan:

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pemerintahan desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat bawah masih menghadapi tantangan dalam hal kapasitas kelembagaan dan efektivitas operasional. Kurangnya sinergi antara aparatur serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi hambatan utama dalam tata kelola yang akuntabel dan responsif. Untuk itu, diperlukan upaya penguatan tata kelola

melalui pelatihan aparatur, pemutakhiran data kependudukan, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis digital untuk mendorong efisiensi dan transparansi.

2. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Pacitan masih tergolong rendah. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya rasa memiliki terhadap program pembangunan dan minimnya pengawasan sosial. Oleh karena itu, perlu dibangun mekanisme partisipatif yang inklusif seperti musyawarah warga, forum konsultasi publik, dan peningkatan literasi pembangunan agar masyarakat aktif berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan daerah.

3. **Penguatan Koordinasi Program Kesejahteraan Sosial Terpadu**

Banyaknya program kesejahteraan sosial dari berbagai sektor belum sepenuhnya berjalan secara terkoordinasi, menyebabkan tumpang tindih, inefisiensi, dan kurang tepat sasaran. Isu kemiskinan dan pemenuhan hak dasar warga miskin masih menjadi tantangan yang mendesak. Untuk itu, dibutuhkan sistem koordinasi lintas sektor dan pendataan terpadu berbasis satu data untuk memastikan program sosial menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan secara tepat, efisien, dan berkelanjutan.

4. **Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Kenyamanan Lingkungan**

Gangguan terhadap ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, serta meningkatnya volume sampah rumah tangga menjadi persoalan serius yang berdampak pada kualitas hidup warga. Penguatan peran Satpol PP, pengawasan lingkungan, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keamanan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman. Kampanye kesadaran serta

penerapan penegakan peraturan daerah perlu diperkuat secara konsisten.

5. Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Publik

Masih terdapat ketimpangan dalam akses dan kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah-wilayah terpencil atau kurang berkembang. Hal ini mencakup layanan kesehatan, administrasi kependudukan, serta layanan dasar lainnya. Upaya pemerataan layanan perlu dilakukan dengan memperkuat kapasitas aparatur, memperluas jangkauan infrastruktur pelayanan, serta digitalisasi pelayanan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hak yang sama secara adil.

6. Peningkatan Infrastruktur Dasar Berbasis Mitigasi Bencana

Kecamatan Pacitan yang terletak di kawasan rawan bencana seperti gempa bumi, longsor, dan banjir memerlukan pendekatan infrastruktur yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik tetapi juga memperhatikan aspek ketangguhan dan kesiapsiagaan. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas publik perlu dibangun dan dipelihara dengan mempertimbangkan risiko bencana serta adaptasi terhadap perubahan iklim agar pembangunan tetap berkelanjutan.

7. Penguatan Ketahanan Air Bersih dan Layanan Air Minum

Krisis air bersih yang kerap terjadi di musim kemarau menunjukkan pentingnya penguatan ketahanan air, baik dari segi ketersediaan maupun pengelolaan sumber daya air. Permasalahan ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan produktivitas ekonomi. Pengembangan sistem penampungan air hujan, perbaikan jaringan distribusi, serta edukasi penghematan air perlu dilakukan agar masyarakat dapat mengakses air bersih secara merata dan berkelanjutan.

8. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan

Tingkat penyerapan anggaran dan kualitas pengawasan kegiatan di Kecamatan Pacitan masih membutuhkan perbaikan signifikan. Rendahnya akuntabilitas berisiko pada pemborosan anggaran dan ketidakefisienan program pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, pelaporan real-time berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas pengawasan internal untuk memastikan bahwa setiap anggaran dikelola secara efektif, efisien, dan transparan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Pacitan 2025-2029 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“PACITAN SEMAKIN SEJAHTERA BAHAGIA”

Adapun misi Kabupaten Pacitan dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. **Pemberantasan Kemiskinan**

Misi ini merupakan misi utama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang menjadi fokus pemerintah ke depan. Salah satu tugas pemerintah yang paling utama adalah membebaskan masyarakatnya daribelenggu kemiskinan, sehingga harkat dan martabat sebagai manusia semakin meningkat. Meskipun permasalahan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sebuah negara/daerah dan tidak mungkin akan terselesaikan semuanya, akan tetapi sudah menjadi hal yang wajib bahwa pemerintah harus hadir dan berpihak kepada masyarakat miskin, mengurangi apa yang menjadi beban hidup masyarakat serta memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.

2. **Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pacitan yang lebih unggul dan berdaya saing yang berpegang Teguh pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Misi ini pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas dan akses pendidikan serta kesehatan, tercukupinya kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, fasilitasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta investasi bidang sumber daya manusia Iainnya. Diharapkan pada akhirnya kualitas dan daya saing masyarakat akan terus meningkat.

3. **Memajukan Pariwisata untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang inklusif (*inclusive growth*), yaitu yang melibatkan sebanyak mungkin penduduk dalam prosesnya. Tujuannya adalah untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk yang berada di bawah garis

kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai guncangan.

Pengurangan kemiskinan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga membutuhkan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan inklusif menuntut adanya intervensi pemerintah yang tepat dan bersifat afirmatif bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Karena peningkatan kapasitas memerlukan waktu, maka program afirmatif perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan sasaran yang terarah, jelas, dan tepat. Untuk itu, optimalisasi sektor pariwisata, sektor agraris, serta sektor-sektor strategis lainnya harus menjadi prioritas utama.

4. Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani

Pariwisata sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menjadi katalis bagi perkembangan sektor-sektor lainnya. Posisi Pacitan sebagai bagian dari kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark merupakan salah satu modal dasar dalam pengembangan pariwisata daerah.

Sektor agraris, yang merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pacitan, perlu dimaksimalkan melalui pemetaan potensi di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan.

Peningkatan kerja sama investasi dengan berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, pelaku usaha mikro, ekonomi kreatif, dan wirausahawan muda perlu terus difasilitasi agar dapat meningkatkan pendapatan dan daya saingnya.

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan berperan dalam mendukung misi 4, yakni **Memperkuat Birokrasi yang Profesional**

dan Melayani, tujuan **Terciptanya Birokasi yang Profesional dan melayani**, dan sasaran **Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Inovatif** dari RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Kecamatan Pacitan yakni Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Kecamatan Pacitan untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

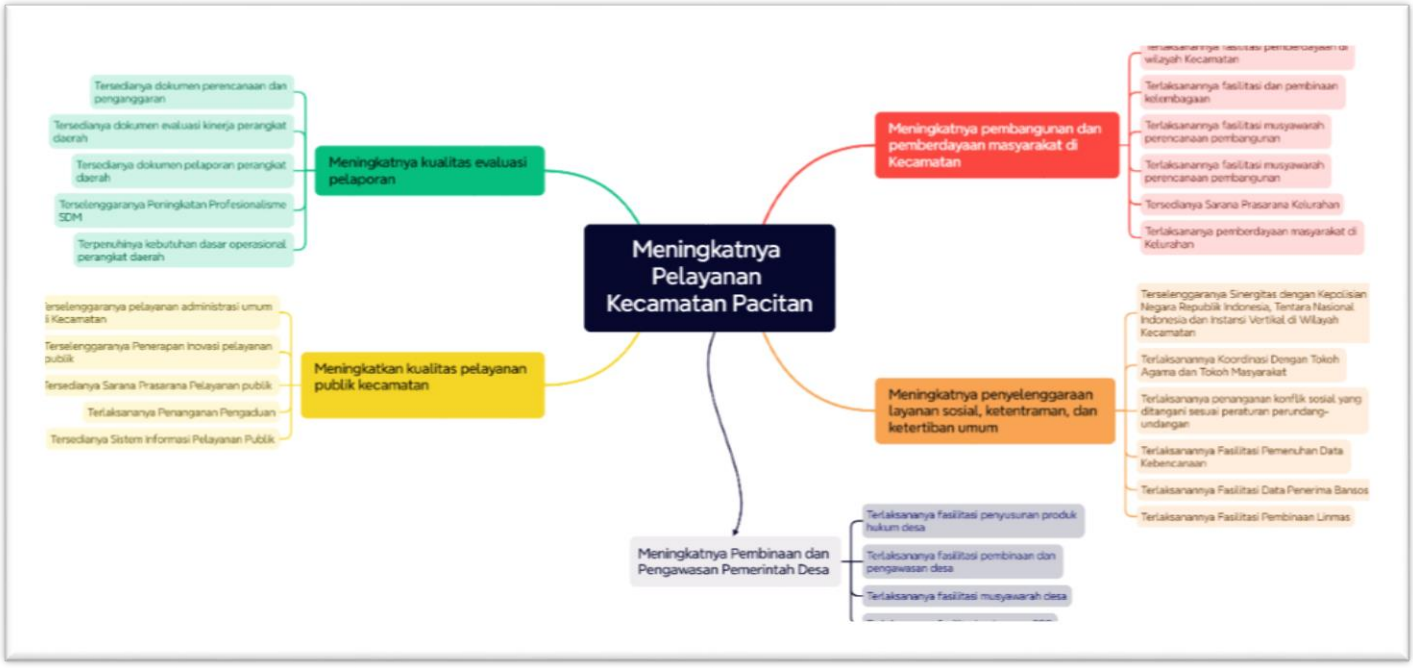
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pacitan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Sasaran: Indeks Pelayanan Publik	Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima		Indeks Pelayanan Publik	3.0	3.3	3.5	4.0	4.3	4.5	
NSPK 1. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 2. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayana umum 3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan 4. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;		Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Pacitan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.5	88.00	88.5	89.00	90.00	91.00	

Sumber: RPJMD Kabupaten Pacitan 2025-2029 (diolah penulis)

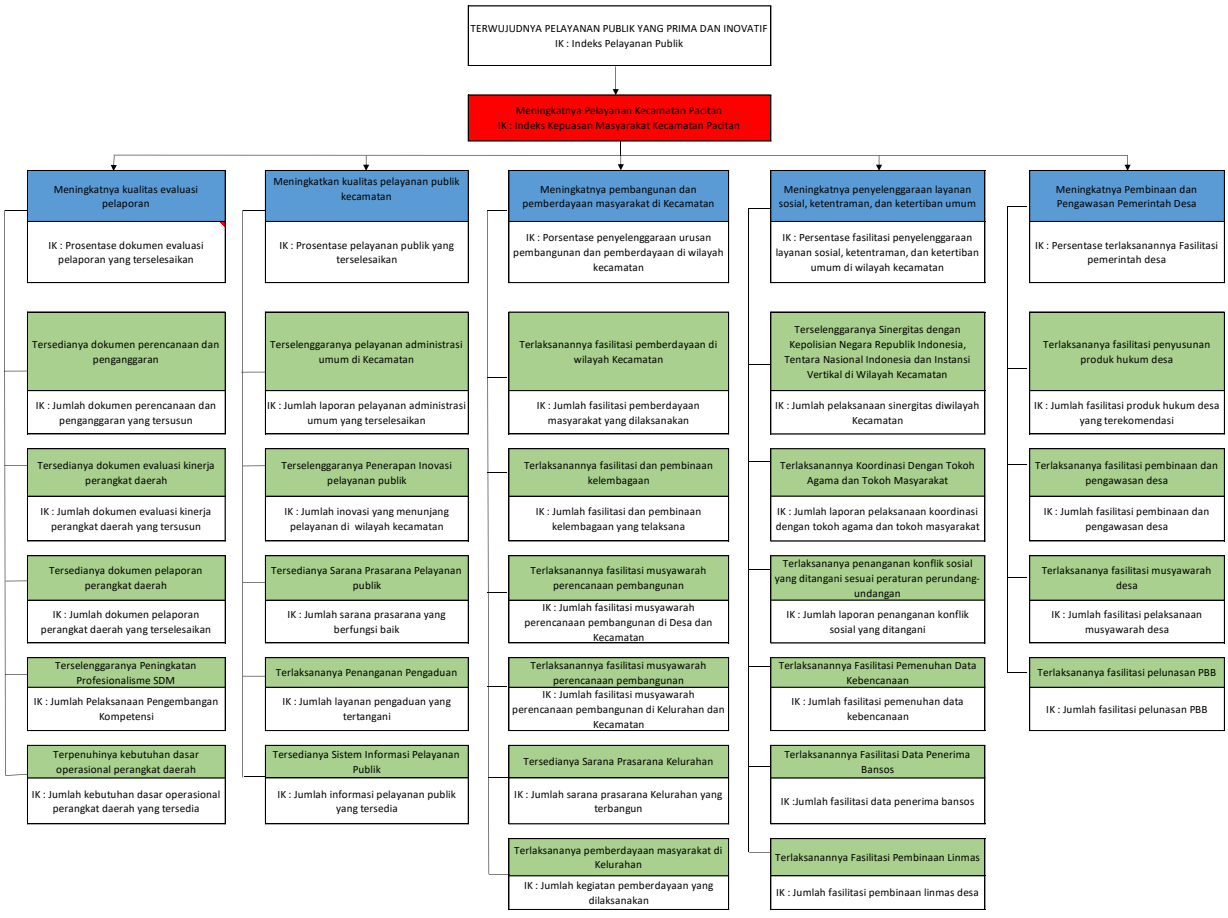
Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan *logical framework* dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai *logical framework* dan pohon kinerja Kecamatan

Pacitan, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.



Gambar 3.1 Logical Framework Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan

Sumber: Diolah Penulis



Gambar 3.2 Pohon Kinerja Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan

Sumber: Diolah Penulis

3.2 Strategi Kecamatan Pacitan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Kecamatan Pacitan, yang meliputi:

Tabel 3.2 Penentuan Strategi Kecamatan Pacitan

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
		Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima	
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan belum berjalan secara optimal	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Pacitan	1. Penguatan kapasitas aparatur desa/kelurahan 2. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pemerintahan
2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih rendah		1. Penguatan forum musyawarah desa/kelurahan 2. Edukasi publik dan pelibatan komunitas lokal
3	Koordinasi dan keselarasan program kesejahteraan sosial belum terpadu		1. Sinkronisasi program antar lembaga/instansi 2. Pemutakhiran data sasaran penerima manfaat
4	Gangguan Ketentraman ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan		1. Revitalisasi peran Linmas dan Satgas Keamanan 2. Edukasi dan pelibatan warga dalam sistem keamanan
5	Akses layanan publik belum merata		1. Penguatan pelayanan berbasis digital 2. Pembukaan layanan publik di wilayah terisolasi
6	Infrastruktur dasar di wilayah kecamatan masih kurang memadais		1. Perencanaan pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat 2. Pemanfaatan dana desa/Kecamatan
7	Ketahanan air bersih		1. Pembangunan dan rehabilitasi sarana air bersih 2. Edukasi pengelolaan dan konservasi air
8	Penyerapan anggaran dan pengawasan kegiatan belum akuntabel		1. Penguatan sistem pelaporan dan evaluasi berbasis kinerja 2. Peningkatan kapasitas pengawasan internal

Sumber: Diolah Penulis

Tabel 3.2 merepresentasikan upaya strategis Kecamatan Pacitan dalam merespons secara menyeluruh berbagai tantangan pembangunan lokal. Permasalahan yang diidentifikasi mencakup aspek pemerintahan, partisipasi masyarakat, koordinasi program sosial, ketertiban umum, layanan publik, infrastruktur dasar, ketahanan air bersih, hingga akuntabilitas anggaran. Setiap isu dirumuskan dengan tujuan yang jelas dan strategi yang saling melengkapi, seperti penguatan kapasitas aparatur, edukasi dan pelibatan warga, integrasi lintas sektor, serta pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Pendekatan yang digunakan mencerminkan prinsip tata kelola yang partisipatif, adaptif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, keseluruhan strategi yang tersusun tidak hanya bersifat reaktif terhadap masalah, tetapi juga proaktif dalam mendorong perbaikan sistemik dan berkelanjutan di tingkat kecamatan.

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Pacitan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Kecamatan Pacitan memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Pacitan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)		(2)	(5)	(6)
1	Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	Peningkatan kualitas dan kompetensi ASN	Penguatan kapasitas SDM dan sistem manajemen kinerja pemerintahan desa/kelurahan	
		Perluasan penyediaan bantuan sosial peningkatan ketahanan pangan terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masayarakat Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah	Penajaman perencanaan terpadu dan peningkatan akurasi data penerima manfaat	
2	Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan terhadap pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah	Pemberdayaan masyarakat melalui forum musyawarah dan pemberian ruang aspirasi publik	
3	• Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; • Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Perbup	Penguatan kapasitas masyarakat tangguh bencana	Revitalisasi satuan keamanan lingkungan dan edukasi kesadaran hukum	
4	Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Percepatan digitalisasi layanan publik	Perluasan layanan publik berbasis teknologi dan peningkatan pelayanan di wilayah terpencil	
		Meningkatnya akses terhadap infrastruktur dasar	Perencanaan pembangunan infrastruktur partisipatif dan berbasis prioritas masyarakat	
			Pengembangan sarana air bersih dan perlindungan sumber daya air	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
5	• Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh OPD di tingkat Kecamatan; • Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Penguatan sistem evaluasi, transparansi pelaporan, dan pembinaan aparatur dalam pengelolaan	

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan Tabel 3.3, dirumuskan arah kebijakan dari akar-akar masalah yang ada di lapangan. Permasalahan seperti lemahnya kapasitas aparatur dan sistem evaluasi kinerja dijawab dengan arah kebijakan berupa penguatan SDM dan manajemen pemerintahan desa/kelurahan. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat mendorong lahirnya kebijakan pemberdayaan publik melalui forum musyawarah dan ruang aspirasi. Ketidaksinkronan data kesejahteraan sosial direspons dengan penajaman perencanaan terpadu dan peningkatan akurasi data. Kurangnya pengawasan lingkungan serta lemahnya sinergi antarpemangku kepentingan dijawab dengan revitalisasi satuan keamanan dan edukasi hukum. Tidak meratanya distribusi layanan publik ditindaklanjuti melalui digitalisasi dan perluasan jangkauan pelayanan. Infrastruktur yang rusak dan belum merata mendorong arah kebijakan

pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Krisis air bersih dijawab dengan pembangunan sarana dan perlindungan sumber daya air.

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran penahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pacitan

Fokus Utama	Rincian Penahapan
Tahap 1 (Tahun 2025) Konsolidasi Tata Kelola dan Pemberdayaan Dasar	
Tata Kelola Pemerintahan	Penataan organisasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa dan kecamatan dalam pelayanan publik
Pemberdayaan Masyarakat	Identifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat berbasis RW/RT dan desa
Pelayanan Publik Dasar	Penguatan layanan dasar melalui pemetaan kebutuhan dan perbaikan sistem pelayanan administrasi dasar
Ketertiban dan Ketahanan Sosial	Pemetaan wilayah rawan gangguan ketertiban dan pelatihan kader siaga bencana
Kesejahteraan Sosial	Pendataan terpadu warga rentan dan miskin ekstrem sebagai dasar intervensi sosial
Infrastruktur Dasar	Pendataan dan pemetaan infrastruktur prioritas di wilayah desa terpencil dan akses ekonomi masyarakat
Tahap 2 (Tahun 2026): Penguatan Infrastruktur Pendukung Layanan dan Pemberdayaan	
Infrastruktur Dasar	Percepatan pembangunan akses jalan desa, fasilitas layanan publik, dan penguatan konektivitas antar wilayah
Pelayanan Publik	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan terpadu kecamatan dan digitalisasi layanan

Fokus Utama	Rincian Penahapan
Pemberdayaan Masyarakat	Aktivasi kelompok masyarakat berbasis potensi lokal, seperti UMKM desa dan koperasi desa
Pemerintahan Efektif	Pelaksanaan SOP pelayanan desa, pengawasan APBDes, dan pelatihan akuntabilitas perangkat desa
Ketertiban dan Sosial	Revitalisasi sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan forum komunikasi sosial
Tahap 3 (Tahun 2027): Transformasi Pelayanan dan Kemandirian Masyarakat	
Pemerintahan Efektif	Transformasi digital sistem pelaporan desa dan pelatihan manajemen program desa
Pemberdayaan	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan inkubasi usaha masyarakat
Layanan Publik	Integrasi layanan berbasis aplikasi dan optimalisasi pelayanan publik keliling
Ketahanan Sosial	Pembentukan forum desa tangguh dan penanganan konflik sosial berbasis kearifan lokal
Kesejahteraan Sosial	Pemaduan program lintas OPD untuk pengentasan kemiskinan desa berbasis data
Tahap 4 (Tahun 2028): Pemerataan Layanan dan Akselerasi Kesejahteraan	
Pemerataan Layanan	Pemastian pemerataan layanan publik hingga ke dusun-dusun terpencil dan wilayah rentan
Kesejahteraan	Pemanfaatan data terpadu untuk distribusi bantuan dan intervensi pembangunan berbasis keluarga
Infrastruktur	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur layanan dasar
Pemberdayaan	Penguatan kelembagaan masyarakat dan jejaring ekonomi lokal
Ketertiban Umum	Program desa aman dan tangguh berbasis komunitas dan integrasi sistem pengaduan masyarakat
Tahap 5 (Tahun 2029): Konsolidasi Capaian dan Daya Saing Wilayah	
Pelayanan Prima	Evaluasi menyeluruh kualitas layanan publik dan penguatan inovasi layanan kecamatan

Fokus Utama	Rincian Penahapan
Pemberdayaan & Pariwisata	Integrasi kegiatan pemberdayaan dengan potensi wisata lokal dan budaya desa
Tata Kelola	Penyesuaian kebijakan pelayanan berbasis hasil evaluasi dan kepuasan masyarakat
Daya Saing Wilayah	Peningkatan promosi potensi desa dan kolaborasi lintas kecamatan
Ketahanan Sosial	Penguatan ketahanan sosial berbasis keluarga dan jejaring komunitas adaptif

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan Tabel 3.4, penahapan perencanaan strategis Kecamatan Pacitan ditunjukkan secara berkelanjutan dan bertahap dari tahun 2025 hingga 2029. Setiap tahapan dirancang untuk menjawab tantangan nyata dengan fokus yang saling melengkapi. Tahap awal (2025) difokuskan pada konsolidasi dasar melalui penataan tata kelola, pemetaan kebutuhan masyarakat, serta pendataan sosial dan infrastruktur. Tahap kedua (2026) menekankan penguatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Memasuki tahap ketiga (2027), orientasi diarahkan pada transformasi layanan dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui BUMDes, digitalisasi, serta integrasi layanan publik. Tahap keempat (2028) fokus pada pemerataan layanan hingga wilayah rentan dan akselerasi kesejahteraan berbasis keluarga. Akhirnya, tahap kelima (2029) menitikberatkan pada konsolidasi capaian, inovasi pelayanan, dan peningkatan daya saing wilayah melalui integrasi sektor pemberdayaan, pariwisata, dan ketahanan sosial. Secara keseluruhan, tahapan ini mencerminkan strategi pembangunan yang progresif, adaptif, dan berbasis data, dengan orientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III dokumen Renstra ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Pacitan disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Renstra Kecamatan Pacitan mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan di Kecamatan Pacitan, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.

Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran: Indeks Pelayanan Publik **NSPK** **1. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** **2. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayana umum** **3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan** **4. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang**	Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima				Indeks Pelayanan Publik Kecamatan		
		Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Pacitan			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pacitan		
			Meningkatnya kualitas evaluasi pelaporan		Persentase dokumen evaluasi pelaporan yang terselesaikan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
				Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
ada di Kecamatan;						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya dokumen pelaporan perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah yang terselesaikan	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terselenggaranya Peningkatan Profesionalisme SDM	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional perangkat daerah	Jumlah kebutuhan dasar operasional perangkat daerah yang tersedia	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
						Peenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Tersusunnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terselesaikan	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan		Persentase pelayanan publik yang terselesaikan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	
				Terselenggaranya pelayanan administrasi umum di Kecamatan	Jumlah laporan pelayanan administrasi umum yang terselesaikan	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terselenggaranya Penerapan Inovasi pelayanan publik	Jumlah inovasi yang menunjang pelayanan di wilayah kecamatan	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Tersedianya Sarana Prasarana Pelayanan publik	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
						Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Penanganan Pengaduan	Jumlah layanan pengaduan yang tertangani	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	Jumlah informasi pelayanan publik yang tersedia	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan		Persentase penyelenggaraan urusan pembangunan dan pemberdayaan di wilayah kecamatan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	
				Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya fasilitasi dan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
				pembinaan kelembagaan	kelembagaan yang telaksana		
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan	Jumlah fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	
						Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
				Terlaksananya fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan	Jumlah fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	
						Evaluasi Kelurahan	
				Tersedianya Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang terbangun	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya penyelenggaraan layanan sosial, ketentraman, dan ketertiban umum		Persentase fasilitasi penyelenggaraan layanan sosial, ketentraman, dan ketertiban	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
					umum di wilayah kecamatan		
				Terselenggaranya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan sinergitas di wilayah Kecamatan	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Terlaksananya penanganan konflik sosial yang ditangani sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan penanganan konflik sosial yang ditangani	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	
						Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi	Jumlah fasilitasi pemenuhan data kebencanaan	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
				Pemenuhan Data Kebencanaan		**Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	
						Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
				Terlaksananya Fasilitasi Data Penerima Bansos	Jumlah fasilitasi data penerima bansos	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	
						Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
				Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Linmas	Jumlah fasilitasi pembinaan linmas desa	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	
						Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	
				Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Jumlah fasilitasi produk hukum desa yang terekomendasi	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	
						Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
				Terlaksananya fasilitasi	Jumlah fasilitasi pembinaan dan	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
				pembinaan dan pengawasan desa	pengawasan desa	**Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
				Terlaksananya fasilitasi musyawarah desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	
						Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
				Terlaksananya fasilitasi pelunasan PBB	Jumlah fasilitasi pelunasan PBB	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	
						Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, subkegiatan, serta pendanaannya:

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72.5	72.75	5,844,996,713	72.75	5,697,596,882	73.50	5,982,477,000	74.00	6,221,776,000	74.50	6,470,647,000	75.00	6,729,473,000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	23 Dokumen	66,500,000	23 Dokumen	66,500,000	23 Dokumen	71,500,000	23 Dokumen	83,000,000	23 Dokumen	108,000,000	23 Dokumen	135,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	47,000,000	5 Dokumen	47,000,000	5 Dokumen	48,000,000	5 Dokumen	50,000,000	5 Dokumen	60,000,000	5 Dokumen	70,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	6,800,000	2 Dokumen	6,800,000	2 Dokumen	8,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	20,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	6,000,000	2 Dokumen	8,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	15,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian	12 Laporan	12 Laporan	1,200,000	12 Laporan	1,200,000	12 Laporan	2,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	8,000,000	12 Laporan	10,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	6,500,000	2 Laporan	6,500,000	2 Laporan	7,500,000	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	15,000,000	2 Laporan	20,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan keuangan Perangkat Daerah	59 Dokumen	59 Dokumen	4,284,000,000	59 Dokumen	4,236,599,882	59 Dokumen	4,482,477,000	59 Dokumen	4,654,776,000	59 Dokumen	4,737,647,000	59 Dokumen	4,848,473,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	40 Orang	4,264,000,000	40 Orang	4,216,599,882	40 Orang	4,458,477,000	40 Orang	4,625,776,000	40 Orang	4,692,647,000	40 Orang	4,788,473,000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	34 Dokumen	34 Dokumen	4,000,000	34 Dokumen	4,000,000	34 Dokumen	5,000,000	34 Dokumen	6,000,000	34 Dokumen	10,000,000	34 Dokumen	15,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1 Laporan	1,500,000	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	15,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	14,500,000	24 Dokumen	14,500,000	24 Dokumen	16,000,000	24 Dokumen	18,000,000	24 Dokumen	25,000,000	24 Dokumen	30,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	100%	58,000,000	100%	58,000,000	100%	61,500,000	100%	66,000,000	100%	77,000,000	100%	88,000,000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	4 Paket	55,500,000	4 Paket	55,500,000	4 Paket	56,500,000	4 Paket	59,000,000	4 Paket	62,000,000	4 Paket	68,000,000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	6 Dokumen	2,500,000	6 Dokumen	2,500,000	6 Dokumen	5,000,000	6 Dokumen	7,000,000	6 Dokumen	15,000,000	6 Dokumen	20,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	313,500,000	100%	313,500,000	100%	324,000,000	100%	339,000,000	100%	393,000,000	100%	425,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	1 Paket	36,500,000	1 Paket	36,500,000	1 Paket	38,000,000	1 Paket	40,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	55,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan														
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	116,000,000	3 Paket	116,000,000	3 Paket	118,000,000	3 Paket	120,000,000	3 Paket	135,000,000	3 Paket	140,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	98,000,000	4 Paket	98,000,000	4 Paket	100,000,000	4 Paket	105,000,000	4 Paket	115,000,000	4 Paket	120,000,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	16,500,000	2 Paket	16,500,000	2 Paket	18,000,000	2 Paket	20,000,000	2 Paket	25,000,000	2 Paket	30,000,000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	45,000,000	4 Paket	45,000,000	4 Paket	47,000,000	4 Paket	49,000,000	4 Paket	60,000,000	4 Paket	70,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1,500,000	12 Laporan	1,500,000	12 Laporan	3,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	8,000,000	12 Laporan	10,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	100%	241,000,000	100%	241,000,000	100%	244,000,000	100%	252,000,000	100%	275,000,000	100%	291,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	43,000,000	4 Unit	43,000,000	4 Unit	44,000,000	4 Unit	45,000,000	4 Unit	55,000,000	4 Unit	60,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	138,000,000	6 Unit	138,000,000	6 Unit	139,000,000	6 Unit	142,000,000	6 Unit	150,000,000	6 Unit	155,000,000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	1 Unit	1 Unit	60,000,000	1 Unit	60,000,000	1 Unit	61,000,000	1 Unit	65,000,000	1 Unit	70,000,000	1 Unit	76,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%	100%	762,000,000	100%	662,000,000	100%	675,000,000	100%	699,000,000	100%	730,000,000	100%	762,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	145,000,000	12 Laporan	145,000,000	12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	152,000,000	12 Laporan	160,000,000	12 Laporan	167,000,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12 Laporan	12,000,000	12 Laporan	15,000,000	12 Laporan	17,000,000	12 Laporan	20,000,000	12 Laporan	25,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	12 Laporan	605,000,000	12 Laporan	505,000,000	12 Laporan	510,000,000	12 Laporan	530,000,000	12 Laporan	550,000,000	12 Laporan	570,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan														
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80%	80%	119,996,713	80%	119,997,000	80%	124,000,000	80%	128,000,000	80%	150,000,000	80%	180,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	47,500,000	10 Unit	47,500,000	10 Unit	49,000,000	10 Unit	50,000,000	10 Unit	60,000,000	10 Unit	65,000,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	26,496,713	18 Unit	26,497,000	18 Unit	28,000,000	18 Unit	30,000,000	18 Unit	40,000,000	18 Unit	45,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	46,000,000	1 Unit	46,000,000	1 Unit	47,000,000	1 Unit	48,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	70,000,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan	100%	100%	86,955,236	100%	79,747,478	100%	83,735,000	100%	87,084,000	100%	90,567,000	100%	94,190,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	12 Bulan	12 Bulan	86,955,236	12 Bulan	79,747,478	12 Bulan	83,735,000	12 Bulan	87,084,000	12 Bulan	90,567,000	12 Bulan	94,190,000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	86,955,236	12 Laporan	79,747,478	12 Laporan	83,735,000	12 Laporan	87,084,000	12 Laporan	90,567,000	12 Laporan	94,190,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang Difasilitasi	100%	100%	4,487,083,830	100%	4,633,430,800	100%	4,865,102,000	100%	5,059,706,000	100%	5,262,094,000	100%	5,472,578,000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	20 Desa	20 Desa	174,000,000	20 Desa	180,000,000	20 Desa	187,000,000	20 Desa	195,000,000	20 Desa	205,000,000	20 Desa	220,000,000	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	29 Dokumen	29 Dokumen	31,000,000	29 Dokumen	35,000,000	29 Dokumen	37,000,000	29 Dokumen	40,000,000	29 Dokumen	45,000,000	29 Dokumen	50,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	143,000,000	12 Laporan	145,000,000	12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	155,000,000	12 Laporan	160,000,000	12 Laporan	170,000,000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	5 Kelurahan	5 Kelurahan	4,313,083,830	5 Kelurahan	4,453,430,800	5 Kelurahan	4,678,102,000	5 Kelurahan	4,864,706,000	5 Kelurahan	5,057,094,000	5 Kelurahan	5,252,578,000	
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan	1,800,000	5 Laporan	5,000,000	5 Laporan	10,000,000	5 Laporan	15,000,000	5 Laporan	20,000,000	5 Laporan	30,000,000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 unit	5 unit	1,259,103,951	5 unit	1,259,603,000	5 unit	1,364,055,000	5 unit	1,475,606,000	5 unit	1,580,000,000	5 unit	1,680,578,000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	3,052,179,879	5 Pokmas/Ormas	3,188,827,800	5 Pokmas/Ormas	3,304,047,000	5 Pokmas/Ormas	3,374,100,000	5 Pokmas/Ormas	3,457,094,000	5 Pokmas/Ormas	3,542,000,000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	100%	26,167,600	100%	44,400,000	100%	46,620,000	100%	48,485,000	100%	50,424,000	100%	52,441,000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Pemenuhan Upaya Penyelenggara	12 Bulan	12 Bulan	26,167,600	12 Bulan	44,400,000	12 Bulan	46,620,000	12 Bulan	48,485,000	12 Bulan	50,424,000	12 Bulan	52,441,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Ketenteraman dan Ketertiban Umum	an Ketentraman dan Ketertiban Umum														
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	14,000,000	12 Laporan	20,200,000	12 Laporan	21,300,000	12 Laporan	22,500,000	12 Laporan	24,000,000	12 Laporan	25,000,000	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	12,167,600	12 Laporan	24,200,000	12 Laporan	25,325,000	12 Laporan	25,985,000	12 Laporan	26,424,000	12 Laporan	27,441,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100%	100%	41,525,800	100%	61,275,000	100%	64,339,000	100%	66,913,000	100%	69,590,000	100%	72,374,000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan	25 Desa/ Kelurahan	25 Desa/ Kelurahan	41,525,800	25 Desa/ Kelurahan	61,275,000	25 Desa/ Kelurahan	64,339,000	25 Desa/ Kelurahan	66,913,000	25 Desa/ Kelurahan	69,590,000	25 Desa/ Kelurahan	72,374,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	pemerintahan umum														
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	29,525,800	12 Laporan	39,275,000	12 Laporan	40,500,000	12 Laporan	42,000,000	12 Laporan	43,000,000	12 Laporan	45,000,000	
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12 Laporan	22,000,000	12 Laporan	23,839,000	12 Laporan	24,913,000	12 Laporan	26,590,000	12 Laporan	27,374,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Termonitoring	100%	100%	77,350,700	100%	83,646,900	100%	87,829,000	100%	91,342,000	100%	94,996,000	100%	98,796,000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang termonitoring	20 Desa	20 Desa	77,350,700	20 Desa	83,646,900	20 Desa	87,829,000	20 Desa	91,342,000	20 Desa	94,996,000	20 Desa	98,796,000	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan	40 Dokumen	40 Dokumen	30,300,000	40 Dokumen	31,646,900	40 Dokumen	32,529,000	40 Dokumen	33,842,000	40 Dokumen	34,500,000	40 Dokumen	35,296,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Desa dan Peraturan Kepala Desa														
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	5,500,000	5 Dokumen	8,500,000	5 Dokumen	9,300,000	5 Dokumen	9,500,000	5 Dokumen	10,000,000	5 Dokumen	11,000,000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	9,102,000	12 Dokumen	9,500,000	12 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	10,500,000	12 Dokumen	11,000,000	12 Dokumen	12,000,000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	7,000,000	12 Dokumen	8,000,000	2 Dokumen	9,000,000	2 Dokumen	9,500,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,500,000	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	12 Laporan	25,448,700	12 Laporan	26,000,000	12 Laporan	27,000,000	12 Laporan	28,000,000	12 Laporan	29,496,000	12 Laporan	30,000,000	

Sumber: RPJMD Kabupaten Pacitan 2025-2029

4.2 Subkegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program dan target pada tahun 2030 disusun sebagai upaya menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Pacitan. Penyusunan program ini menjadi pijakan strategis dalam merumuskan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pacitan periode selanjutnya, sehingga seluruh arah kebijakan dan kegiatan yang dirancang tetap selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang daerah. Dengan demikian, kesinambungan antara dokumen perencanaan akan terjaga secara sistematis dan konsisten, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara berkelanjutan.

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan subkegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta subkegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi *outcome* yang terukur dan terarah.

Program tahun 2030 disusun sebagai bagian integral dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Pacitan. Penyusunan program ini menjadi pijakan strategis dalam merumuskan Renja Kecamatan Pacitan tahun 2030, sehingga seluruh arah kebijakan dan kegiatan yang dirancang tetap selaras dengan visi,

misi, dan tujuan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang daerah. Dengan demikian, kesinambungan antara dokumen perencanaan akan terjaga secara sistematis dan konsisten, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara berkelanjutan.

Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	**Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
2	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan desa**	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

Sumber: RPJMD Kabupaten Pacitan 2025-2029 (diolah penulis)

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pacitan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3.0	3.3	3.5	4.0	4.3	4.5	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87.5	88.00	88.5	89.00	90.00	91.00	

Sumber: Bappeda Kabupaten Pacitan dan Kecamatan Pacitan, 2025

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Kecamatan Pacitan Kabupaten telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kecamatan Pacitan yang tercakup dalam Urusan Kewilayahan memiliki Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pacitan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3.0	3.3	3.5	4.0	4.3	4.5	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87.5	88.00	88.5	89.00	90.00	91.00	

Sumber: Bappeda Kabupaten Pacitan dan Kecamatan Pacitan, 2025

BAB V
PENUTUP



PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Renstra Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Renstra Kecamatan Pacitan ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kecamatan Pacitan. Pelaksanaan Renstra Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Renstra Kecamatan Pacitan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Pacitan. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pacitan 2025-2029.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Pacitan. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan Pacitan berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Renstra Kecamatan Pacitan Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten PacitanTahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Pacitan periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus

pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulai yang berlaku.

PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN